



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. Abdul Hadi H.S., M.M.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/13 Juni 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat/tempat tinggal : Jl. Hidup Baru Nomor 6D RT.001
RW.007 Kelurahan Gandaria utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : - Direktur Utama PT. Jakarta
Propertindo (PT. JAKPRO) periode
tahun 2015 s.d 2016.
- Komisaris PT. Jakarta Infrastruktur
Propertindo (PT.JIP) periode 2015
s.d 2016

PENAHANAN

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Tahanan Kota pertama Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 1 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Tahanan Kota kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
7. Tahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
8. Tahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2024;

Terdakwa Abdul Hadi, HS dalam perkara ini didampingi oleh Advokat dan Penasehat Hukum yaitu Prof. DR. Adnan Hamid, SH, MH, MM, Hasbullah, SH, MH, Raul Gindo Cahayo, SH, MH, Raden Nanda Setiawan, SH, MH, Maydika Ramadani, SH, MH, Sandi Yudha Prayoga, SH, MH, Novenia Irfani Safitri, SH, Nugi Nugroho, SH, Abrar Zuhdi, SH, Hermala Fauziah, SH dan Dian Ayu Pratiwi, SH dari Kantor Hukum HASBULLAH & PARNERTS LAW OFFICE, beralamat di Gedung 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 9-Unit E, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Kuningan, Jakarta Selatan 12870 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Legalisasi Surat Kuasa dibawah Register Nomor 264 tanggal 02 April 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa ABDUL HADI, H.S tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Halaman 2 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ABDUL HADI, H.S** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Hadi H.S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Abdul Hadi H.S dari Dakwaan Primair sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Abdul Hadi H.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Abdul Hadi H.S oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Abdul Hadi H.S sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 3 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disita dari Lusiana Herawati 16 Mei 2023.

- | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan PMP sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- dari APBDP Pemprov DKI tahun 2015 yang berisikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT JAKPRO kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor: 027/UT2000/110/XI/2015 perihal permohonan pencairan pemenuhan PMP sebesar Rp. 1.5T dari APBD-P Tahun 2015 tertanggal 12 November 2015 yang ditandatangani oleh Dirut PT Jakpro Abdul Hadi Hs.b. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi dari PT. JAKPRO untuk penerimaan setoran Penyertaan Modal Pemprov DKI Jakarta untuk Pemenuhan modal dasar PT Jakpro sebesar Rp. 1.5T dari Pemprov DKI Jakarta tertanggal 11 November 2015 yang ditandatangani oleh Dirut PT. Jakarta Propertindo saudara Abdul Hadi Hs.c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: 004/UT2000/121/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dirut PT. Jakpro saudara Abdul HAdi Hs dan Dirkeu PT. Jakpro saudara Lim Lay Ming.d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pengeluaran Pembiayaan (SPP-LS Pengeluaran Pembiayaan) Nomor: 00520/SPP/1.20.380/XII/2015 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudari Tien Sumartini selaku Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00522/SPM/1.20.380/XII/2015 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPM- |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Halaman 4 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0004975/SP2D/XII/2015 Tahun 2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudari Yanni Suryani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - h. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0009636/SPD/XI/2015 Tahun 2015 tertanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kepala BPKAD.
 - i. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 nomor: DPA-SKPD 1.20.380 380 00 000 6 2, Disahkan di Jakarta dengan nomor: 741/DPPA/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kepala BPKAD.
2. 1 (satu) bundle fotocopy surat Nomor : 05/NA/PI-DKI/REKOM-JAKPRO/XI/2015, tanggal 16 November 2015 perihal Rekomendasi PMD Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT. JAKPRO.
 3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT JAKPRO kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor: 075/UT2000/110/XI/2015 perihal Studi Kelayakan Pentertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta Tahun 2015 pada PT Jakarta Propertindo.
 4. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2080 Tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015.
 5. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah

Halaman 5 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2015 tanggal 20

Januari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2080 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015.

6. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 644 Tahun 2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2015.

7. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2241 tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang pengangkatan Ir. NUR ALI NUGROHO, MAPPI (Cert) sebagai penasihat Investasi Daerah.

8. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2698 tahun 2015, tanggal 8 Desember 2015 tentang pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada PT. JAKPRO tahun Anggaran 2015.

9. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank DKI periode tanggal 15 Desember 2015 s/d 15 Deseber 2015 No. AC : 139-02-01605-4, tanggal 20 Maret 2023.

10.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2030 Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015.

11.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disita dari Ramadhiansyah Rambe tanggal 16 Juni 2023

- | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) bundle Fotocopy Studi Kelayakan Peneyertaan Modal Pemerintah (PMP) Melalui APBN-DKI Jarkarta Propertindo Oktober 2015. 1 (satu) bundle Fotocopy penetapan nilai penyertaann modal dan penyerahan asset Pemprov DKI Jakarta kepada PT. TJ (BUMD) melalui Inbreg dilakukan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Halaman 6 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundle Fotocopy Struktur, Job Desc, Capain Kinerja dan Rencana Kerja (Serah terima dari Lim Lay Ming), 28 Agustus 2018.
4. 1 (satu) bundle Fotocopy pembentuka Holding BUMD DKI Jakrata (Skema : Inbeng Saham Pemprov DKI kepada PT. JAKPRO) tanggal 10 November 2015.
5. 1 (satu) bundle Fotocopy rekomendasi penyertaan modal daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT. JAKPRO Nomor : 04/NA/PI-DKI/REKOM-JAKPRO/XI/2015, tanggal 16 Nov 2015.
6. 1 (satu) lembar fotocopy penyampaian Laporan Ringkasan Penerimaan dan Penggunaan Dana PMP PT Jakpr kepada Kepala Badan Pembinaan BUMD Prov DKI Jakarta Nomor: 110/KU0000/II/2023/0007, tanggal 8 Februari 2023.
7. 30 (tigapuluh) halaman fotocopy Studi Kelayakan Kegiatan untuk CAPEX untuk Perusahaan INBRENG (Sinergy BUMD/BUMD) 2015.
8. 1 (satu) bundle Fotocopy Review rencana penguranga modal pemerintah pada PT. JAKPRO , tanggal 12 Nov 2015.
9. 1 (satu) bundle Fotocopy Studi Kelayakan Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT Jakpro kepada Kepala BPKAD Prov. DKI Jakarta Nomor: 075/UT2000/110/XI/2015. 24 Nov 2015.
10. 1 (satu) bundle Fotocopy Penyampaian Studi Kalayakan PMP melalui PBD-DKI Jakarta kepada PT Jakpro, kepada Kepala BPKAD Pemprov DKI Jakarta Nomor: 008/UT2000/110/XI/2015, 5 Nov 2015.
11. 2 (dua) lembar Fotocopy laporan monitoring pelaksanaan proyek atau kegiatan atas penggunaan dana PMD kepada BUMD dan PT PATUANG Pemprov DKI Jakarta per Desember 2022.
12. 3 (tiga) lembar Fotocopy daftar dokumen 12 kegiatan PMD Pemprov tahun 2015.
13. 5 (lima) lembar Fotocopy Dokumen detail serapan Investasi pada proyek properti, Infrastruktur, Utilitas dari 2013 s/d 2022.

Halaman 7 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 4 (empat) lembar Fotocopy rencana penggunaan dana Realokasi PT. JAKPRO tahun 2015.
15. 8 (delapan) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 5.006.221.574,30.
16. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 5.006.429.793.48.
17. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 87.559.263.919.60.
18. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 54.528.443.524.29.
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 5.535.869.011.76.
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 5.583.012.907.92.
21. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 3.001.795.699.76.
22. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 3.251.638.160.96.
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 7.101.992.440.83.
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 7.070.915.116.67.
25. 9 (sembilan) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 2.122.745.622.71.

Halaman 8 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 7 (tujuh) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 2.649.877.906.96.
27. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 8.035.804.956.95.
28. 2 (dua) lembar Fotocopy koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 8.957.854.725.37.
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mega periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 150.205.607.88.
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mega periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 165.561.247.18.
31. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808165752 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
32. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808165752 periode 1 Agustus-31 Agustus 2018.
33. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808170004 periode 1 Agustus-31 Agustus 2018.
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808170004 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
35. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808006126 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
36. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808006126 periode 1 Agustus-31 Agustus 2018.
37. 1(satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 30202000011 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
38. 1(satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 30202000011 periode 1 Agustus - 31 Agustus 2018.
39. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BCA No Rek: 581-5000789 periode 30 Juni - 31 Juli 2018.
40. 1(satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank BCA No Rek: 581-5000789 periode 30 Juli - 31 Agustus 2018.

Halaman 9 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening koran Bank BCA No Rek: 686-093399 periode 30 Juni - 31 Juli 2018.
42. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening koran Bank BCA No Rek: 686-093399 periode 30 Juli -31 Agustus 2018.
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0191635599 Periode tanggal 01-07-2018 s/d 31-07-2018.
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0191635599 Periode tanggal 01-05-2013 s/d 31-07-2018.
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0198277523 Periode tanggal 14-05-2013 s/d 06-09-2018.
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank BJB No rek 0022181769001 periode 1 Juli – 31 Juli 2018.
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank BJB No rek 0022181769001 ; periode 1 Agustus – 31 Agustus 2018.
48. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BJB No rek 0056537074001 ; periode 1 Juli – 31 Juli 2018.
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank BJB No rek 0056537074001 ; periode 1 Agustus – 31 Agustus 2018.
50. 1(satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank OCBS NISP No rek 624010099999 periode 1 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018.
51. 1(satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank OCBS NISP No rek 624010099999 periode 1 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018.
52. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 30 Juni 2018 Nomor : 037/UT2000/110/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.
53. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) Triwulan IV 2019 Nomor : 081/UT0000/110/VII/2018 tanggal 24 Januari 2020.
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Monitoring Pelaksanaan tugas Proyek/Kegiatan atas penggunaan dana penyertaan modal Daerah (PMD) tahun 2006 s/d 2016 Kepada PT. JAKPRO per 30 April 2017, Mei 2017.
55. 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Monitoring Penggunaan

Halaman 10 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana - Penyertaan Modal Daerah (PMD) Nomor :

071/UT2000/110/IV/2016, tanggal 29 April 2016.

56. 4 (empat) lembar Fotocopy Laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Juli 2017 Nomor: 031/UT2000/110/VII/2017, tanggal 16 Agustus 2017.

57. 1 (satu) bundle Fotocopy Tanggapan atas surat Bareskrim Polri Nomor: 110/KU0000/IV/2023, tanggal 19 April 2023.

58. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU1000-JI-1512-00011, tanggal 15-12-2015.

59. 2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor: 004/DK-JP/Pst/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.

60. 2 (dua) lembar Fotocopy surat Reprerentasi atas studi kelayaka penyertaan modal daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2916 pada PT. JAKPRO Nomor : 012/UT2000/110/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015.

61. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27-04-17.

62. 1 (satu) bundle Fotocopy bukti Journal pembayaran Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28-07-2017.

63. 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Pinjaman Nomor Jakpro: 005/UT2000/107/IV/2017 dan Nomor: 003/PT. JIP/P/IV/2017 PT. JIP, tanggal 25 April 2017.

64. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Nomor: 002/UT2000/111/VI PT. JAKPRO Nomor: 002/UT2000/V111/VII/2018, tanggal 10 September 2018.

65. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Nomor: 001/UT2000/111/VII/2016 PT. JAKPRO, tanggal 28 Juli 2016.

66. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO (Perseroda) Nomor : 152/UT0000/111/II/2020 PT. JAKPRO, tanggal 20 Februari 2016.

67. 3 (tiga) lembar Fotocopy Review Surat Permohonan Pinjaman Pemegang Saham Nomor : 185/JIP/IV/2017, tanggal 4 April 2017.

Halaman 11 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Nomor : 071/JIP/II/2017, tanggal 16 Februari 2017.
69. 1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Perubahan Struktur Organisasi PT. JAKPRO Nomor : 002/UT2000/111/IV/2018, tanggal 25 April 2015.
70. 1 (satu) bundle Fotocopy AKTA Notaris berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT. JAKPRO Nomor : =1= tanggal 4 Juni 2008.
71. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Nomor : 003/UT2000/111/XI/2018, tanggal 19 November 2018.
72. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank DKI Cab. Balikpapan 1DR-08-16575-2, tanggal 31 Desember 2015.
73. 1 (satu) Bundle Fotocopy Studi Kelayakan Kegiatan Capek untuk Perusahaan Inbreng (Sinergy BUMD/BUMN), tahun 2015.
74. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Jurnal Penerimaan Nomor : JI-1809-00128, tanggal 17-09-2018.
75. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Jurnal Penerimaan Nomor : JI-1811-00090, tanggal 13-11-2018.
76. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU2000-JI-1612-00047, tanggal 30 Desember 2016.
77. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU1000-JI-1512-00016, tanggal 23 Desember 2015.
78. 1 (satu) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Ringkasan Penerimaan Dana PMD PT. JAKPRO s/d Juni 2021 Nomor : 110/UT/0000/VIII/2021/0280, tanggal 12 Agustus 2021.
79. 3 (tiga) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan I Nomor : 021/UT/0000/110/V/2020, tanggal 14 Mei 2020.
80. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan IV Nomor : 081/UT/0000/110/II/2020, tanggal 24 Januari 2020.
81. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan III Nomor : 048/UT/0000/110/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019.
82. 3 (tiga) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi

Halaman 12 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan II Nomor :

075/UT/0000/110/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019.

83. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Maret 2019 Nomor : 016/UT/2000/110/IV/2019, tanggal 18 April 2019.

84. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Desember 2018 Nomor : 064/UT/2000/110/II/2019, tanggal 28 Januari 2019.

85. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 30 Juni 2018 Nomor : 064/UT/2000/110/VII/2019, tanggal 17 Juni 2019.

86. 1 (satu) bundle Fotocopy AKTA Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO Nomor : 3, tanggal 8 Mei 2017.

87. 1 (satu) bundle Fotocopy AKTA Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO Nomor : 04, tanggal 20 Juni 2016.

88. 4 (empat) lembar Fotocopy Permohonan Pencairan Pemenuhan PMP sebesar Rp.1.500.000.000.000,- dari APBD-P tahun 2015 Nomor : 027/UT2000/110/XI/2015, tanggal 12 November 2015.

89. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU1000-JI-1512-00011, tanggal 15-12-2015.

90. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank DKI 108-08-16575-2 periode 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015, tanggal 31 Desember 2015.

91. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28-07-2017.

92. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27-04-2017.

93. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1603-00087, tanggal 17-03-2016.

Halaman 13 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 6 (enam) lembar Fotocopy data rekapitulasi pinjaman yang diberikan PT. JAKPRO kepada PT. JIP periode 31 Desember 2014 s/d 2018.
95. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU1000-JO-1510-00005, tanggal 02-10-2015.
96. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta pernyataan keputusan pemegang Saham diluar rapat PT. JIP No. 5, tanggal 16 April 2018.
97. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Nomor: KU2000-BK-1508-00109, tanggal 24-04-2017.
98. 1(satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro No. BJ 716380, tanggal 24 Agustus 2015.
99. 1(satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 135/JIP/Srt/VII/2015, perihal Proyeksi Proyek (Laba rugi dan Arus Kas, tanggal 18 Agustus 2015.
- 100.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor : KU2000-VC-1508-00002, tanggal 24 Agustus 2015.
- 101.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Dana talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor: KU2000-1508-00002, tanggal 20 Agustus 2015.
- 102.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK PT. JIP Nomor : 5/KU2000-103/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015.
- 103.2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK Nomor : 135/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015.
- 104.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 002/DEKOM-JIP/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015.
- 105.2 (dua) lembar Fotocopy Risala Rapat Dewan Direksi PT. JAKPRO, tanggal 06 Agustus 2015.
- 106.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Dana Talangan Proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU1000-JV-1508-00123, tanggal 21 Agustus 2015.
- 107.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi permohonan persetujuan

Halaman 14 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris untuk penambahan setoran modal dan

pengajuan fasilitas pembiayaan ke Bank Nomor :
124/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015.

108.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan persetujuan Dewan Komisaris untuk penambahan setoran modal dan pengajuan fasilitas pembiayaan ke Bank Nomor: 124/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015.

109.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 002/DEKOM-JIP/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015.

110.4 (empat) lembar Fotocopy Risala Rapat Dewan Direksi PT. JAKPRO permohonan pemberian modal kerja proyek TIK. PT. JIP, tanggal 06 Agustus 2015.

111.7 (tujuh) lembar Fotocopy Rencana Proyek TIK di Kuartal Ketiga tahun 2015 dan Kebutuhan Modal Kerajaan.

112.1 (satu) bundle Fotocopy Perjanjian Pekerjaan antara PT. TGM dengan PT. JIP No: 0001/PPJ-SACME /TGM-XYZ/XX-2015, tanggal 14 Agustus 2015.

113.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-058-00016-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

114.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-059-00015-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

115.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-060-00009-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

116.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-061-00009-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

117.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-062-00017-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

118.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-063-00021-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

119.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-064-00024-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

120.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-065-00022-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

121.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-066-00023-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

Halaman 15 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-067-00007-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 123.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-068-00018-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 124.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-069-00001-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 125.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-70-00014-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 126.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-71-00005-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 127.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-72-00004-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 128.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-73-00019-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 129.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-074-00012-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 130.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-075-00013-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 131.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-076-00008-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 132.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-078-00003-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 133.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-078-00003-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 134.1 (satu) lembar Fotocopy lampiran daftar nilai
Telecommunication Infrastructure.
- 135.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman Sementara
untuk Proyek TIK Nomor : ... /JIP/Srt/IX/2015, tanggal 30
September 2015.
- 136.4 (empat) lembar Fotocopy Surat pemberitahuan persetujuan
Kredit (SPPK) An. PT. JIP Nomor : 1706/GKK/IX/2015.-
- 137.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi surat masuk permohonan
pinjaman sementara untuk proyek TIK Nomor :
126/JIP/Srt/IX/2015, tanggal 3 September 2015.
- 138.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Memo Dana Talangan PT.

Halaman 16 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JIP U/Proyek PT. TIK Nomor : KU2000-1510-00001, tanggal 08

Oktober 2015.

139.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Dana Talangan PT. JIP U/Proyek PT. TIK Nomor : KU1000/-JV-1510-00046, tanggal 08 Oktober 2015.

140.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 011/DK-JP/Pst/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015.

141.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan PT. JIP U/Proyek PT. TIK Nomor : KU2000-VC-1510-00001, tanggal 08 Oktober 2015.

142.1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank DKI No. BJ 716398, tanggal 20-10-2015.

143.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Nomor : KU2000-BK-1510-00102, tanggal 20-10-2015.

144.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU1000-JO-1510-00115, tanggal 30 Oktober 2015.

145.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-JO-1603-00087, tanggal 17 Maret 2016.

146.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Memo Surat Persetujuan Komisaris tentang pemberian fasilitas pinjaman modal kerja PT. JIP Nomor : 11/VP/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.

147.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-JO-1603-00087, tanggal 17 Maret 2016.

148.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-VC-1603-00003, tanggal 15 Maret 2016.

149.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Memo Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-VC-1603-00003, tanggal 15 Maret 2016.

150.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor

Halaman 17 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... , tanggal ... ,
- 151.2 (dua) lembar Fotocopy Memo Permohonan Persetujuan Pinjaman Sementara PT. JIP untuk Proyek TIK Nomor : 01/KU2000/103/III/2016, tanggal 10 Maret 2016.
- 152.1(satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat Permohonan Pinjaman Sementara untuk Proyek TIK Nomor : 071/JIP/Srt/II/2016, tanggal 29 Februari 2016.
- 153.10 (Sepuluh) lembar Fotocopy Rencana Proyek PT. JIP tahun 2016.
- 154.1 (satu) lembar Fotocopy Kontarak Kerjasama PT. DAYA MITARA TELEKOMUNIKASI dan PT. JAKPRO (PT. JIP).
- 155.4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. DAYA MITARA TELEKOMUNIKASI dengan PT. JIP Nomor : DTM.0331/PM2/DKA-a1000000/VI/2016, tanggal 12 Januari 2016.
- 156.1 (satu) lembar Fotocopy Risala Rapat Penunjukan Mitra Pekerjaan SACME Nomor : (...)/PM2/DMT-DK-120000a1000000/V/2015, tanggal 11 Januari 2016.
- 157.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 011/DK-JP/Pst/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015.
- 158.5 (lima) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit (SPPK) Nomor : 0263/GKK/II/2016, tanggal 29 Februari 2016.
- 159.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor : KU2000-JV-1603-00063 berdasarkan Memo-01/KU2000/103/III/2016, tanggal 16 Maret 2016.
- 160.1 (satu) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Uang Muka Investasi ke PT. JIP untuk Preyek TIK Nomor : KU2000-JO-1602-00002, tanggal 1 Februari 2016.
- 161.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran. Uang Muka Investasi ke PT. JIP untuk Preyek TIK Nomor : KU2000-BK-1602-00002, tanggal 01-02-2016.
- 162.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Uang Muka Investasi ke PT. JIP untuk Preyek TIK Nomor : KU2000-VC-1601-00005, tanggal 26 Januari 2016.

Halaman 18 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163.1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan Persetujuan Anggaran Nomor : KU2000-VC-1601-00005, tanggal 16 Januari 2016.
- 164.2 (dua) lembar Fotocopy Memo Permohonan Persetujuan Pinjaman Sementara yang akan di Konversikan menjadi Ekuitas kepada PT. JIP terkait Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor : 01/KU0000/103/II/2016, tanggal 26 Januari 2016.
- 165.1(satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 025/JIP/Srt/II/2016, permohonan pinjaman sementara untuk proyek TIK, tanggal 21 Januari 2016.
- 166.1(satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman sementara untuk proyek TIK Nomor : 025/JIP/Srt/II/2016, tanggal 21 Januari 2016.
- 167.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 001/DEKOM-JP/II/2016, tanggal 13 Januari 2016.
- 168.9 (sembilan) lembar Fotocopy Rencana Proyek PT. JIP di Kuartal Pertama Tahun 2016.
- 169.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Uang Muka Inverstasi Ke PT. JIP untuk proyek TIK Nomor : KU2000-JV-1601-00086, tanggal 27 Januari 2016.
- 170.1 (satu) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27 April 2017.
- 171.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran. Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-BK-1704-00115, tanggal 27 April 2017.
- 172.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Pengeluaran. Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-VC-1704-00001, tanggal 05 April 2017.
- 173.1 (satu) lembar Fotocopy Iternal Memo Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU6000-1704-00001, tanggal 05 April 2017.

Halaman 19 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.129 (dua belas) lembar Fotocopy Permohonan persetujuan pembelian pinjaman pemegang saham Tahun 2017 serta pencairannya kepada PT. JIP untuk proyek Teknologi Komunikasi dan Informatika Nomor : 004/KU4000/103/III/2017, tanggal 27 Maret 2017.

175.1 (satu) bundle Fotocopy Permohonan Persetujuan Pinjaman Subordinasi Proyek Micro/Macro Cell, Subducting, GPON, tanggal 8 Maret 2017.

176.4 (empat) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 055/JIP/III/2017, permohonan pinjaman pemegang saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi tahun 2017, tanggal 30 Maret 2017.

177.2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor: 085/JIP/VI/2017, Riview Surat permohonan pinjaman pemegang saham tahun 2017, tanggal 04 April 2017.

178.3 (tiga) lembar Fotocopy Indikasi Penawaran Fasilitas Kredit Nomor : 0443/GKK/III/2017, , tanggal 31 Maret 2017.

179.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 517/JIP/XII/2016, permohonan pinjaman pemegang saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi awal tahun 2017, tanggal 13 Desember 2016.

180.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman pemegang saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi awal tahun 2017 Nomor : 517/JIP/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.

181.1 (satu) lembar Fotocopy Tanggapan Dewan Komisaris atas rencana pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP Nomor : 006/DK-JP/Pst/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

182.2 (dua) lembar Fotocopy Tanggapan Permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham pada PT. JIP Nomor : 037/UT2000/110/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.

183.5 (lima) lembar Fotocopy permohonan tanggapan pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi komunikasi untuk tahun Anggaran 2017 Nomor : 004.01/DK-JP/Srt/II/2017, tanggal 28 Februari 2017.

Halaman 20 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184.5 (lima) lembar Fotocopy Risala Rapat Pembahasan RKAP PT. JAKPRO Tahun 2017, tanggal 17 Januari 2016.
- 185.4 (empat) lembar Fotocopy bukti Journal Voucher. Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-JV-1704-00111, tanggal 05-04-2017.
- 186.1 (satu) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28 Juli 2017.
- 187.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : KU2000-BK-1707-00075 tanggal 28 Juli 2017.
- 188.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : KU6000-VC-1707-00001, tanggal 4 Juli 2017.
- 189.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Permohonan pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : /KU6000-1707-00001, tanggal 17 Juli 2017.
- 190.3 (tiga) lembar Fotocopy Meno permohonan pencairan pinjaman pemegang saham tahap II kepada PT. JIP untuk proyek Teknologi dan Informatika Nomor : 012/KU4000/103/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017.
- 191.6 (enam) lembar Fotocopy perjanjian pinjaman Nomor Jakpro: 565/UT2000/107/IV/2017 Nomor JIP: 003/JIP/P/IV/2017, tanggal 25 April 2017.
- 192.5 (lima) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher pinjaman pemegang saham tahap II kepada PT. JIP untuk proyek Teknologi dan Informatika Nomor : KU1000-JV-1508-00123, tanggal 21 Agustus 2015.
- 193.7 (tujuh) lembar Fotocopy perjanjian pinjaman Nomor Jakpro : 001/UT2000/107/IV/2018 Nomor JIP : 002/JIP/P/IV/2018, tanggal 03-04 2018.

Halaman 21 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194.2 (dua) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran JV-1804-00002 pinjaan sementara ke PT. JIP sebesar Rp. 100 Miliar Nomor : JO-1804-00008, tanggal 04-04-2018.
- 195.6 (enam) lembar Fotocopy Memo permohonan persetujuan pemberian pinjaman sementara kepada PT. JIP sebesar Rp. 100 Miliar untuk kebutuhan dana pelunasan kredit modal kerja kepada Bank DKI Nomor : 013/KU6000/103/III/2018, tanggal 27 Maret 2018.
- 196.3 (tiga) lembar Fotocopy permohonan pinjaman untuk pelunasan KMK Bank DKI Nomor : 198/JIP/Srt/III/2018, tanggal 26 Maret 2018.
- 197.7 (tujuh) lembar Fotocopy surat persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor : 0026.GKK/I/2018.
- 198.1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor : 67, tanggal 29 Nopember 2016.
- 199.4 (empat) lembar Fotocopy pelaporan atas rencana pemberian pinjaman sementara kepada PT. JIP Nomor : 001/UT2000/110/IV/2018, tanggal 4 April 2018.
- 200.1 (satu) bundle Fotocopy Perjanjian Pinjaman Nomor JAKPRO : 001/UT2000/107/VIII/2018, Nomor JIP : 004/JIP/P/VIII/2018, tanggal 02-08-2018.
- 201.1 (satu) lembar Fotocopy Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ke PT. JIP Nomor : 392/JIP/IX/2016, tanggal 30 September 2016.
- 202.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 374/JIP/IX/2016, tanggal 08 September 2016.
- 203.1 (satu) bundle AKTA Notaris Perjanjia Kredit Nomor : 67, tanggal 29 November 2016.
- 204.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan surat pernyataan penjamin Bilyet Deposito Nomor : 441/JIP/XI/2016, tanggal 16 November 2016.
- 205.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 440/JIP/SP/XI/2016, tanggal 3 November 2016.
- 206.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan persetujuan komisariss untuk fasilitas pembiayaan perbankan Nomor :

Halaman 22 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
438/JIP/XI/2016, tanggal 2 November 2016.

207.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 1195/GKK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016.

208.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 004/DK-JP/Pst/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

209.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pemegang Saham PT. JIP Nomor : 445/JIP/XI/2016 tanggal 4 November 2016.

210.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 004/DK-JP/Pst/X/2016 tanggal ... Oktober 2016.

211.3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Serkuer Para Pemegang Saham PT. JIP, tanggal 11 November 2016.

212.5 (lima) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 1114/GKK/IX/2016, tanggal 23 September 2016.

213.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Pengembalian pokok dana talangan dari PT. JIP untuk keperluan proyek TIK-IM Nomor : 095/UT2000/110/XI/2015, tanggal 23 Desember 2015.

214.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Penerimaan Nomor : KU2000-BM-1512-00003, tanggal 15 Desember 2015.

215.2 (dua) lembar Fotocopy Tagihan Dana Talangan PT. JIP atas Pembayaran Proyek TIK Nomor: 095/UT2000/110/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015.

216.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU1000-JO-1508-00131, tanggal 26 Agustus 2015.

217.3 (tiga) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-BK-1508-00109, tanggal 24 Agustus 2015.

218.2 (dua) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor : KU2000-VC-1508-00002, tanggal 20 Agustus 2015.

219.4 (empat) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan

Halaman 23 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana talangan proyek TIK-PT. JIP berdasarkan Memo-01/KU1000/103/III/2016 Nomor : KU1000-JI-1612-00047, tanggal 30 Desember 2016.

220.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank pengembalian dana talangan proyek TIK-PT. JIP berdasarkan Memo-01/KU1000/103/III/2016 Nomor : KU1000-BM-1612-00015, tanggal 13 Desember 2016.

221.8 (delapan) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Desember 2016 s.d 26 Desember 2016 Account No. 103000199155.

222.4 (empat) lembar Fotocopy surat permohonan setoran modal kepada dirut PT. JAKPRO Nomor : 039/JIP/DIR/I/2018, tanggal 19 Januari 2018.

223.1 (satu) bundle Fotocopy surat permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP sebesar terkait rencana proyek GPON Rp. 118.341.000.000,- Nomor : 113/OP2000/103/V/2018, 17 Mei 2018.

224.1 (satu) bundle Fotocopy permohonan persetujuan pemberian pinjaman sementara kepada PT. JIP Rp. 100 Miliar untuk kebutuha dana pelunasa kredik modal kerja (KMK) kepada Bank DKI Nomor : 013/KU6000/103/III/2018, tanggal 27 Maret 2018.

225.3 (tiga) lembar Fotocopy surat keputusan para pemegang Saham (KPPS) yang berkekuatan sama dengan RUPS PT. JIP, tanggal 21 Desember 2015.

226.1 (satu) bundle Fotocopy Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja- Kredit Agunan Tunai/ Cash Collateral Nomor : 06, tanggal 06-11-2015.

227.1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris antara PT. JIP dengan Bank DKI. Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja- Kredit Agunan Tunai/Cash Collateral Nomor : 06, tanggal 06-11-2015.

228.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan pencairan DPO170001 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 078644 November 2018 Nomor : JI-1811-00090, tanggal 13 November 2018.

Halaman 24 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Penerimaan pencairan DPO170001 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 078644 Nomor : BM-181100090, tanggal 13 November 2018.
- 230.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran pencairan DPO170001 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 078644 Nomor : JO-1811-00411, tanggal 13 November 2018.
- 231.3 (tiga) lembar Fotocopy Pencairan Deposito Nomor : 029/UT2000/110/XII/2018, tanggal 12 Nopember 2018.
- 232.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan pencairan DPO170004 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 013969 (Breakable) 17/9/2018 Nomor : JI-1809-00128, tanggal 17 September 2018.
- 233.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Penerimaan pencairan DPO170004 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 0139 Nomor : BM-180900119, tanggal 17 September 2018.
- 234.3 (tiga) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran DPO170004 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 013969 Nomor: JO-1809-00436, tanggal 29 September 2018.
- 235.3 (tiga) lembar Fotocopy Pencairan Deposito Nomor : 024/UT2000/110/IX/2018, tanggal 14 September 2018.
- 236.1 (satu) bundle Fotocopy Permohonan Bantuan Pinjaman Modal Kerja Proyek Menara Telekomunikasi IBS Nomor : 336/JIP/Srt/VIII/2016, tanggal 09 Agustus 2016.
- 237.2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan pinjaman pemegang Saham dan Rencana pinjaman perbankan untuk Investasi awal tahun 2017 Nomor : 517/JIP/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.
- 238.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat Permohonan pinjaman pemegang Saham dan Rencana pinjaman perbankan untuk Investasi awal tahun 2017 Nomor : 517/JIP/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.
- 239.5 (lima) lembar Fotocopy Risalah Rapat Pembahasan RKAP PT. JAKPRO tahun 2017, tanggal 17 Januari 2017.
- 240.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Nomor : 071/JIP/II/2017, tanggal 16 Februari 2016.

Halaman 25 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241.5 (lima) lembar Fotocopy Permohonan tanggapan atas pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek telekomunikasi untuk tahun anggaran 2017 Nomor : 004.01/DK-JP/Srt/II/2017, tanggal 22 Februari 2017.
- 242.1 (satu) lembar Fotocopy Tanggapan Dewan Komisaris Permohonan rencana pemberian pinjaman pemegang saham pada PT. JIP Nomor : 037/UT2000/110/III/2017, tanggal 15 Maret 2017.
- 243.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham pada PT. JIP Nomor : 006/DK-JP/Srt/III//2017, tanggal 22 Maret 2017.
- 244.1 (satu) lembar Fotocopy Dukungan atas aksi Korporasi terkait pinjaman Subordinasi Nomor : 003/DEKOM/-JIP/III/2017, tanggal 27 Maret 2017.
- 245.6 (enam) lembar Fotocopy Memo permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham tahun 2017serta pencairannya kepada PT. JIP untuk proyek teknologi komunikasi dan Informatika Nomor : 004/KU4000/103/III/2017, tanggal 27 Maret 2017.
- 246.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman pemegang Saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi tahun 2017 Nomor : 155/JIP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017.
- 247.1 (satu) lembar Fotocopy Jadwal Penarikan Pinjaman Subordinasi Pemegang Saham, tanggal 30 Maret 2017.
- 248.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi permohonan pinjaman pemegang Saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi tahun 2017 Nomor : 155/JIP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017.
- 249.1 (satu) lembar Fotocopy Review surat permohonan pinjaman pemegang Saham Nomor : 185/JIP/IV/2017, tanggal 04 April 2017.
- 250.1 (satu) lembar Fotocopy Disposi Review surat permohonan pinjaman pemegang Saham Nomor : 185/JIP/IV/2017, tanggal 30 Maret 2017.
- 251.3 (tiga) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Piutang

Halaman 26 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Afiliasi Nomor : KU6000-VC-1704-00001, tanggal 05 April

2017.

252.1 (satu) lembar Fotocopy perjanjian pinjaman PT. JIP No Jakpro : 005/UT2000/107/IV/2017 dan No JIP 003/JIP/P/IV/2017 25 April 2017.

253.1 (satu) lembar Fotocopy Bilyer Giro Nomor : CL093465, tanggal 27 April 2017.

254.2 (dua) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Piutang Afiliasi Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27 April 2017.

255.5 (lima) lembar Fotocopy permohonan pencairan tahap II Nomor : 318/JIP/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017.

256.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pencairan Nomor : KU4000/103/VII/2017, tanggal ... Juli 2017.

257.1 (satu) lembar Fotocopy internal memo Nomor : KU6000-1704-00001, tanggal 14 Juli 2017.

258.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher pinjaman pemegang Saham kepada PT. JIP untuk Proyek Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Tahap II 2017 Nomor : KU2000-JV-1715-0051, tanggal 18 Juli 2017.

259.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran pinjaman pemegang Saham kepada PT. JIP untuk Proyek Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Tahap II 2017 Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28 Juli 2017.

260.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran pinjaman pemegang Saham kepada PT. JIP untuk Proyek Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Tahap II 2017 Nomor : BK-1718-00075 tanggal 28 Juli 2017.

261.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan perpanjangan pinjaman Nomor : 273/JIP/Srt/IV/2018, tanggal 18 April 2018.

262.8 (delapan) lembar Fotocopy Permohonan persetujuan Addendum perjanjian pinjaman antara PT. JIP atas pinjaman proyek Teknologi Komunikasi dan Informatika (GPON Tower Telco dan Subdukting) serta pelaporan progress Teknologi Komunikasi dan Informatika Nomor : 025/KU6000/103/V/2018,

Halaman 27 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 21 Maret 2018.

- 263.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (PKS) No : TGM-075-00013-0301-0815, tanggal 05 Agustus 2015.
- 264.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Proyeksi Proyek (Laba Rugi dan Arus Kas) Copy persetujuan Dekom JIP, Risala Rapat Direksi Jakpro, Kontarak Payung Pembangunan 200 Site antara Triview-JIP dan 24 SPK dari Triview Nomor : 135/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015.
- 265.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK PT. JIP Nomor : 5/KU2000/103VIII/3015, tanggal 20 Agustus 2015.
- 266.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor: /KU2000-1508-00002, tanggal 20 Agustus 2015.
- 267.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-VC-0002, tanggal 20 Agustus 2015.
- 268.1 (satu) lembar Fotocopy Journal Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-JO-00131, tanggal 26 Agustus 2015.
- 269.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti KAS/BANK PENGELUARAN dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-BK-1508-00109, tanggal 24 Agustus 2015.
- 270.2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian Penggunaan Dana PMP Nomor : 029/UT2000/110/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.
- 271.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Realokasi Penggunaan PMP Nomor: UT2000/110/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015.
- 272.1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Rapat Pemegang Saham di luar rapat PT. JAKPRO, tanggal April 2015.
- 273.1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris berita acara rapat umum pemegang Saham, tanggal 20 Januari 2015.
- 274.1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Simulasi pendanaan untuk proyek penugasan, tanggal November 2015.
- 275.1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Realokasi dana PMP akusisi PT. PALYJA, tanggal 9 November 2015.

Halaman 28 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276.1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Penyertan modal pemerintah DKI Jakarta tahun 2016 di PT. JAKPRO (Rapat terbatas DPRD DKI Jakarta, tanggal 10 November 2015.
- 277.1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0191635599 Periode tanggal 01-08-2018 s/d 31-08-2018.
- 278.1 (satu) bundle Fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 PT. JAKPRO dan entitas anak Nomor: 003/KU0000/121/IX/2019.
- 279.3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2698 tahun 2015, tanggal 8 Desember 2015 tentang pemcairan PMD pada PT. JAKPRO tahun Anggaran 2015.
- 280.2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2241 tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang pengangkatan Ir. NUR ALI NUGROHO, MAPPI (Cert) sebagai penasehat penasehat Invertasi Daerah.
- 281.1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 644 tahun 2015, tanggal 23 April 2015 tentang Penjabat diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar tahun anggaran 2015.
- 282.3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2080 tahun 2014, tanggal 2 Desember 2014 tentang penunjukan kuasa bendahara umum Daerah tahun anggaran 2015.
- 283.2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 73 tahun 2015, tanggal 20 Januari 2015 tentang perubahan atas Keggub Nomor : 2080 tahun 2014 tentang penunjukan kuasa bendahara umum Daerah tahun anggaran 2015.
- 284.1 (satu) bundle Fotocopy surat Nomor : 05/NA/PI-DKI/REKOM-JAKPRO/XI/2015, tanggal 16 November 2015 perihal Rekomendasi PMD Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT. JAKPRO.
- 285.2 (dua) lembar Fotocopy surat rincian dokumen pelaksanaan

Halaman 29 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah Nomor DPA-SKPD 1.20.380.380.00.000.6.2, tanggal 30 Oktober 2015.

286.2 (dua) lembar Fotocopy surat rincian dokumen pelaksanaan perubagan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah Nomor DPA-SKPD 1.20.380.380.00.000.6.2, tanggal 30 Oktober 20151 (satu) lembar Fotocopy rekening Koran Bank DKI periode tanggal 15 Desember 2015 s/d 15 Deseber 2015 No. AC : 139-02-01605-4, tanggal 20 Maret 2023.

Disita dari Maryanti tanggal 03 Agustus 2023

3. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Studi Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) – DKI Jakarta Kepada PT. Jakarta Propertindo Bulan Oktober 2015.

Disita dari Ir. Abdul Hadi H.S, MM tanggal 31 Agustus 2023

4. 1. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Kartu tanda Penduduk Atas Nama Abdul Hadi H.S, NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3174071306570003, Kewarganegaraan : Indonesia.

2. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Akta Notaris Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.KN. SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00176.AH.02.01.Tahun 2015 Tanggal 16 Maret 2015, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta Infrastruktur Mandiri, Nomor: 06, tanggal 10 Desember 2015.

3. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Akta Notaris, Nomor: 28, tanggal 20 Januari 2015 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.101.AH.02.02-Tahun 2011, tanggal 8 November 2011, Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Nomor: 561/BL/STTD-N/2012, tanggal 25 Januari 2012, terkait Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Jakarta Propertindo.

Halaman 30 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundle fotocopy berwarna dokumen Akta Notaris, Nomor: 102, tanggal 30 Mei 2016 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.101.AH.02.02-Tahun 2011, tanggal 8 November 2011, Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Nomor: 561/BL/STTD-N/2012, tanggal 25 Januari 2012, terkait Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jakarta Propertindo.

Disita dari Aji Rizki Yodhana, S.H., M.H. tanggal 14 September 2023

5. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Akta Notaris, Nomor: 13, tanggal 29 Juli 2015 dari Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H, SK MENKEH & HAM RI Tgl 26 Februari 2002 Nomor : C-131 HT 03.02 Tahun 2002 SK KEPALA BPN, Tanggal 29 Oktober 2002 No: 16-X-2002, Terkait Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo.

Disita dari Euis Sumiati, S.E. tanggal 19 Oktober 2023

6. 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BAST PKS No.0364.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BAST PKS No.086.
3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BAST PKS No.278.
4. 1 (satu) bundle fotocopy PKS ONE TIME VENDOR (OTV) PEKERJAAN SACME MACROCELL DMT.0364/PM2/DKAA 1000000/XII/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.
5. 1 (satu) bundle fotocopy PKS ONE TIME VENDOR (OTV) PEKERJAAN MACROCELL DMT.086/PM2/DKAA1000000/III/2017 TANGGAL 3 APRIL 2017 PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.
6. 1 (satu) bundle fotocopy PKS ONE TIME VENDOR (OTV) PEKERJAAN MACROCELL, CORE DMT.278/PM2/DKAA1000000/X/2017 TANGGAL 11 OKTOBER 2017 PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.
7. 1 (satu) bundle Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan sama Dengan

Halaman 31 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor 06 Tanggal 10 Desember 2015.
8. 1 (satu) bundle Fotocopy Akte Pendirian PT. Jakarta Propertindo dan Perubahannya.
 9. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor : 025/JIP/SRT/II/2016 Tanggal 21 Januari 2016 Perihal Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen.
 - 10.1 (satu) bundle Fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 071/JIP/SRT/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen.
 - 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 190/JIP/SRT/IX/2016 Tanggal 30 September 2015 Perihal Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen copy risalah rapat dewan Direksi PT Jakarta Propertindo, Rekapitulasi SPK yang sudah diterima dari PT Triview Geospatial Mandiri, SPPK dari Bank DKI.
 - 12.1 (satu) bundle fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 135/JIP/SRT/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen copy Persetujuan Dewan Komisaris PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, risalah rapat dewan Direksi PT Jakarta Propertindo, Copy Kontrak Pyung Pembangunan 200 site antara Triview – JIP, Copy 24 SPK dari Triview.
 - 13.1 (satu) bundle Fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 124/JIP/SRT/VIII/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 Perihal

Halaman 32 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pesetujuan Dewan Komisaris Untuk

Penambahan Setoran Modal dan Pengajuan Fasilitas Pembiayaan Ke Bank Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen Persetujuan Dewan Komisaris.

14.1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Direksi PT. Jakarta Propertindo Nomor : 009/UT/2000/111/IX/2016 Tanggal 11 November 2016.

15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 336/JIP/VIII/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 Perihal Permohonan Bantuan Pinjaman Modal Kerja Proyek Menara Telekomunikasi IBS berserta Lampiran Paparan Proyek Menara Telekomunikasi IBS.

16.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 008/JIP/Kpts/XI/2015 Tentang pengangkatan Sdr. CHARISTMAN DESANTO H.S. SE, MSI, AK Sebagai Vice President (VP) Keuangan Dan TIK PT. JIP Pada Tanggal 02 November 2015.

17.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 001/JIP/Kpts/XI/2015 Tentang pengangkatan Sdr. CHARISTMAN DESANTO H.S. SE, MSI, AK Sebagai Vice President (VP) Keuangan Dan TIK PT. JIP Pada Tanggal 02 November 2015.

18.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Asli Surat Nomor : 226/JIP/Srt/X/2015 Prihal : Pemberitahuan Usulan Promosi Karyawan Pada Tanggal 29 Oktober 2015.

19.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 24/JIP/Kpts/XI/2016 Tentang pengangkatan Sdr. ANDRIE SUDARYANTO AK Sebagai CORDINATOR PROJECT PT. JIP Pada Tanggal 26 Oktober 2015.

20.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 03/JIP/Kpts/IV2017 Tentang pengangkatan Sdr. ANDRIE SUDARYANTO AK Sebagai KARYAWAN TETAP PT. JIP Pada Tanggal 26 April 2017.

Halaman 33 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 016/JIP/Kpts/VIII/2016 Tentang Penetapan Penghasilan Sdr. CHARISTMAN DESANTO H.S. SE, MSI, AK Sebagai Vice President (VP) Keuangan Dan TIK PT. JIP Pada Tanggal 15 Agustus 2016.
- 22.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 14/JIP/Kpts/VIII/2016 Tentang pengangkatan Sdr. DEFIANA TARIGAN Sebagai Asisten Manager Oprasional Teknologi Informasi dan Komunikasi PT. JIP Pada Tanggal 05 Agustus 2016.
- 23.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 13/JIP/Kpts/VIII/2016 Tentang Pengangkatan Sdr. RICKY AFRIANTO Sebagai Manager Oprasional Teknologi Informasi dan Komunikasi PT. JIP Pada Tanggal 05 Agustus 2016.
- 24.2 (dua) lembar Fotocopy Risalah rapat, Permohonan pemberian modal kerja proyek TIK PT. JIP, pada tanggal 26 Februari 2016.
- 25.1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Asli Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, pada tanggal 6 Agustus 2019.
- 26.1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Asli Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, pada tanggal 6 Agustus 2019.
- 27.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, nomor: 038/UT2000/110/VIII/2016, tanggal 18 agustus 2016 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, beserta Laporan Hasil Audit PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Tahun 2015 dan Periode 1 Januari s/d 30 April 2016 nomor : LHA-01/UT1000/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 dengan Surat

Halaman 34 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas nomor : 005/UT2000/110/V/2016, tanggal 9 Mei 2016.

- 28.1 (satu) bundel fotocopy Surat Direktur PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo dengan nomor: 019/JIP/Srt/II/2016, tanggal 13 Januari 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris untuk penambahan modal disetor dan fasilitas pembiayaan Bank, beserta Surat Persetujuan Dewan Komisaris nomor : 001/DEKOM-JIP/II/2016, tanggal 13 Januari 2016 dengan Papan Rencana Proyek TIK di Kuartal Pertama Tahun 2016.
- 29.1 (satu) bundel fotocopy dokumen INTERNAL MEMO nomor : 11/VP/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, perihal Surat Persetujuan Komisaris Tentang Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja PT. JIP.
- 30.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-yahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013.
- 31.1 (satu) bundle fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo tanggal 29 September 2015.
- 32.1 (satu) bundel fotocopy Materi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Tahun Buku 2015.
- 33.1 (satu) bundel fotocopy AKTA Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO tanggal 20 Juni 2016 nomor 04 dengan notaris LUMASSIA SH.
- 34.1 (satu) bundel fotocopy AKTA Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO tanggal 8 Mei 2017 nomor 3 dengan notaris ERNI ROHAINI, SH., MBA.
- 35.1 (satu) bundel fotocopy Surat Direktur PT. Triview Geospasial Mandiri, tanggal 30 Desember 2015 Perihal Kemajuan Pekerjaan dan Status Penagihan Proyek Pengadaan Menara Telekomunikasi.
- 36.3 (tiga) lembar fotocopy Lampiran daftar nilai SPK PT. Triview Geospasial Mandiri.

Halaman 35 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Site Accou-
sition Site Aquisition dan Civil Mechanical dan Electrical antara
PT. Triview Geospatial Mandiri dengan PT. Jakarta Infrastruktus
Propertindo nomor : 001/PPJ-SACME/TGM-XYZ/XX-2015, tan-
ggal 14 Agustus 2015.
- 38.2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Dewan Direksi PT.
Jakarta Propertindo hari kamis 6 Agustus 2015 dengan
Pimpinan Rapat Direktur Utama Abdul Hadi Hs terkait
Permohonan Pemberi Modal Kerja Proyek TIK PT. Jakarta
Infrastruktur Propertindo.
- 39.2 (dua) lembar fotocopy Surat dari PT. Jakarta Infrastruktur
Propertindo dengan nomor surat : 124/JIP/Srt/VIII/2015 tanggal
11 Agustus 2015, Perihal permohonan Persetujuan Dewan
komisaris untuk Penambahan Setoran Modal dan Pengajuan
Fasilitas Pembiayaan Ke Bank.
- 40.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris dengan
nomor : 002/DEKOM-JIP/VIII/2015 tanggal 12 agustus 2015,
Perihal Tindak lanjut dari atas Paparan dan Permohonan Surat
Direktur Utama PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo.
- 41.5 (lima) lembar fotocopy Surat PT. Jakarta Infrastruktur
Propertindo nomor surat : 135/JIP/Srt/VIII/2015 tanggal 18
agustus 2015, Perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja
Proyek TIK.
- 42.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Dewan komisais nomor :
001/DEKOM-JIP/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 terkait Tindak
Lanjut dari Papran dan Permohonan Surat Direktur PT. Jakrta
Infrastruktur Propertindo.
- 43.1 (satu) bundle fotocopy surat PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PT. TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI DENGAN PT.
JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO:
TSM.017/PRASITAC/PM1806114/VI/2018.
- 44.1 (satu) bundle fotocopy surat PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO
DENGAN PT. TOWERINDO PERKASA INTI NO :
007.A/JIP/PKS/IX/2018.

Halaman 36 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.3 (tiga) lembar fotocopy surat PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO DENGAN PT.INTAN PRIMA SEJAHTERA NO : 004A/JIP/P/VIII/2017.
- 46.1 (satu) bundle fotocopy surat PERJANAJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MITRRA MULTI SOLUSI DENGAN PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 0035/M2SJIP00/SACME/04/XII/2015.
- 47.1 (satu) lembar surat fotocopy PERMOHONAN MENJADI REKANAN KONTRAKTOR MENARA TELEKOMUNIKASI dari PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO untuk PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI NO : 303/JIP/SRT/XII/2015 tanggal: 17 DESEMBER 2015.
- 48.1 (satu) lembar surat fotocopy PEMBERITAHUAN TERDAFTAR REKANAN KONTRAKTOR MENARA TELEKOMUNIKASI dari PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI untuk PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 15.001TSM042016 tanggal : 15 APRIL 2016.
- 49.1 (satu) lembar fotocopy surat PENGAJUAN HARGA SIS/SITAC DAN CME dari PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO untuk PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI, NO : 363/JIP/SRT/VIII/2016 tanggal : 29 AGUSTUS 2016.
- 50.1 (satu) lembar fotocopy surat BERITA ACARA KLARIFIKASI DENGAN NEGOSIASI dari PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI untuk PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO :TSM.101/6/SACME16.
- 51.3 (tiga) lembar surat fotocopy KEPUTUSAN DIREKSI PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 32JIP/KPTS/XII/2016 tentang PEMILIHAN MITRA USAHA KERJASAMA PERSEROAN DALAM RANGKA INVESTASI JANGKA PANJANG.
- 52.2 (dua) lembar surat fotocopy KEPUTUSAN DIREKSI PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 33JIP/KPTS/XII/2016 tentang PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PT.JAKARTA

Halaman 37 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.

53.6 (enam) lembar fotocopy KUALIFIKASI/PEMILIHAN KONTRAKTOR PEKERJAAN PENGADAAN & PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI PELAKSANAAN TAHUN 2016.

54.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Site Acquisition Site Aquisition dan Civil Mechanical dan Electrical antara PT. Triview Geospatial Mandiri dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor : 001/PPJ-SACME/TGM-XYZ/XX-2015, tanggal 14 Agustus 2015.

55.1 (satu) bundle fotocopy legalisir DOKUMEN PROJECT LIST PT. TSM (TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI) sebanyak 100 site kepada PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.

56.2 (dua) lembar fotocopy Amandemen perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Jasa konstruksi Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME) Microcell Pole (MCP) dan BTS Hotel, Nomor: 0002/TBGTBG00/VEMSACMEMCP/04/VIII/2017.

57.2 (dua) lembar fotocopy SURAT KESEPAKATAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJASAMA KONSTRUKSI DAN/ATAU NON KONSTRUKSI NO: 001/IPSJIP/VI/2015.

58.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Manajemen PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor: 110/JIP/PM/IV/2016 tanggal 15 april 2016.

Disita dari DEFIANA TARIGAN, S.T. tanggal 19 Oktober 2023

- 7. 1. 1 (satu) odner hitam yang berisikan dokumen fotocopy:
 - a. Dokumen File Tower Catelya Bassura dengan isi:
 - 1) 6 (enam) lembar Dokumen Owner Estimate.
 - 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.
 - 3) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.
 - 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.
 - 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.
 - b. Dokumen File Tower Astelia Bassura dengan isi:
 - 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.

Halaman 38 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.

3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.

4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.

5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

c. Dokumen File Ratu Prabu 2 dengan isi:

1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.

2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.

3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.

4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.

5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

d. Dokumen File Menara Kuningan dengan isi:

1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.

2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.

3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.

4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.

5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

e. Dokumen File Menara Graha Surveyor dengan isi:

1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.

2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.

3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.

4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.

5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

f. Dokumen File Menara Gedung Maspion dengan isi:

1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.

2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.

3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.

4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.

5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

g. Dokumen File Pondok Indah Tower 3 dengan isi:

1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.

2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.

3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.

4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.

5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

h. Dokumen File Pondok Indah Tower 2 dengan isi:

Halaman 39 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none"> 1) 9 (sembilan) lembar Dokumen Owner Estimate. 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal. 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga. 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi. 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang. <p>i. Dokumen File Pondok Indah Tower 1 dengan isi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate. 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal. 3) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Penawaran Harga. 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi. 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.
Disita dari ACHMAD HIDAYAT, S.E tanggal 02 Nopember 2023	
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) lembar fotocopy Email dari Adi Fitra kepada Achmad Hidayat yang berisikan Paparan BPKAD – Pendanaan PMP dan Pinjaman Daerah untuk RKAP 2016, Pada tanggal 22 Oktober 2015. 2. 1 (satu) lembar fotocopy Email dari Sultan Ery kepada Achmad Hidayat yang berisikan Revisi Buku Study Kelayakan, Pada tanggal 12 Desember 2015. 3. 1 (satu) lembar fotocopy Kronologis Penyertaan Modal Daerah Tahun 2015 sampai 2016. 4. 1 (satu) bundel fotocopy Pendanaan PMP dan Pinjaman Daerah Untuk RKAP 2016 PT. Jakarta Propertindo, Pada tanggal 22 Oktober 2015.
Disita dari DEFIANA TARIGAN, S.T. tanggal 07 Nopember 2023	
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) lembar SPK Implementasi CME area Maluku no : 001/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016. 2. 1(satu) lembar SPK Implementasi CME area Papua Barat no : 002/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016. 3. 1(satu) lembar SPK Implementasi CME area Nusa Tenggara Timur no : 003/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016. 4. 1(satu) lembar SPK Implementasi CME area Sulawesi Utara

Halaman 40 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 004/SPK/DMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran
tanggal 30 Mei 2016.

Disita dari RAMADHIANSYAH RAMBE tanggal 30 Nopember 2023

- | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Jakarta Properindo tanggal 4 Juni 2008 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn. 2. 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. JAKPRO tahun 2014. 3. 1 (satu) Bundel rencana kerja dan anggaran kerja perusahaan (RKAP)- revisi tahun 2015 PT.Jakpro. 4. 1 (satu) Bundel rencana kerja dan anggaran kerja perusahaan (RKAP)- revisi tahun 2015 PT.Jakpro. 5. 1 (satu) Bundel berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT.Jakpro dengan Nomor Akta 28 Tanggal 20 Januari 2015 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H.,M.Kn. 6. 1 (satu) Bundel berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT.Jakpro dengan Nomor Akta 3 Tanggal 4 Februari 2015 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H.,M.Kn. 7. 1 (satu) Bundel berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT.Jakpro dengan Nomor Akta 18 Tanggal 23 Juni 2015 dengan Notaris ANDALIA FARIDA, S.H., M.H. 8. 1 (satu) Bundel pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar PT.Jakpro dengan Nomor Akta 91 Tanggal 14 Juli 2015 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H.,M.Kn. 9. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT.Jakpro tahun 2016. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Disita dari AJI RISQI YODHANA, S.H., M.H. tanggal 6 Desember 2023

- | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Jakarta Komunikasi, Nomor Akta 131, pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan Notaris SUTJPTO, S.H., M.Kn. 2. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-87605.AH.01.02.Tahun 2008, |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Halaman 41 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 November 2008 tentang Peresetujuan Akta

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

3. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Jakarta Komunikasi berubah nama menjadi PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, Nomor Akta 11, pada tanggal 4 Juni 2014 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
4. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Mitra Multi Solusi (M2S) dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor: 0035/M2S-JIP-00/SACME/04/XI/2015 tanggal 26 November 2015.
5. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac antara PT. M2S dengan PT. JIP yang berisikan:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/III/2016-086, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 289 Nilai Rp. 415.000.000.
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/III/2016-087, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 692 Nilai Rp. 415.000.000.
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/III/2016-088, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 810 Nilai Rp. 415.000.000.
 - d. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/III/2016-089, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 533 Nilai Rp. 415.000.000.
 - e. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/III/2016-090, Tanggal 25 Februari 2016 Site Makassar 508 Nilai Rp. 415.000.000.
6. 1 (satu) bundle fotocopy Purchase Order (PO) antara PT. M2S dengan PT. JIP yang berisikan:
 - a. Purchase Order Nomor: 05-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Selam Old Biaya Rp. 300.000.000.
 - b. Purchase Order Nomor: 03-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Boksit/Suasa Biaya Rp. 300.000.000.

Halaman 42 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Purchase Order Nomor: 01-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Kenanga Sari/Dr. Mansyur Biaya Rp. 300.000.000.
- d. Purchase Order Nomor: 04-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Busi/Avros Biaya Rp. 300.000.000.
- e. Purchase Order Nomor: 02-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Karya Kasih Biaya Rp. 300.000.000.
7. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pekerjaan Site Accousition Site Acquisition & Civil Mechanical & Electrical antara PT. Triview Geospatial Mandiri (TGM) dan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Nomor: 0001/PPJ-SACME/TGM-XYZ/XX-2015, tanggal 14 Agustus 2015.
8. 1 (satu) bundle fotocopy Purchase Order (PO) antara PT. TGM dengan PT. JIP yang berisikan:
 - a. Purchase Order Nomor: 0106 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Lampung, Rp.111.553.500.
 - b. Purchase Order Nomor: 0107 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Purwokerto Kulon, Rp.163.098.130.
 - c. Purchase Order Nomor: 0108 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Bontang, Rp.18.110.665.
 - d. Purchase Order Nomor: 0109 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Slawi Wetan, Rp.206.584.000.
 - e. Purchase Order Nomor: 0106 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Patean wetan, Rp.217.722.145.
9. 1 (satu) bundle fotocopy kelengkapan dokumen mendirikan tower dengan Site Yogyakarta Kentungan tinggi tower 42 Meter, tipe site Green Field/Roof Top.
- 10.1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Telkominfra Solusi Mandiri (TSM) nomor: 007/JIP/PKS/IX/2018 tanggal 13 september 2018.

Halaman 43 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>11.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Towerindo Perkasa Inti (TPI).</p> <p>12.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Intan Prima Sejahtera (IPS).</p> <p>13.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Intan Pratama Sejahtera (IPS).</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disita dari AJI RISQI YODHANA, S.H., M.H. tanggal 6 Desember 2023

12.	<p>1. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PPKP Menara Sudirman dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor Ref. No. UM-203/HRL-LO/PPKP MS/VII/17.</p> <p>2. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perhimpunan Penghuni Menara Kadin Indonesia dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor Ref/MGT/179.350.02(009)/MKI/V/2018, tanggal 28 Mei 2018.</p> <p>3. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Menara Duta dengan PT. Jakarta Infrastruktur Properindo nomor: 001-18/MD/MDB/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.</p> <p>4. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Menara Antam Sejahtera dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo No:012/MAS-SPK/VII/2018 tgl 25 Juli 2018.</p> <p>5. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Uji Terima antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Ardena Cakra Buana (ACB) tanggal 4 Januari 2018.</p> <p>6. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Ardena Cakra Buana (ACB) tanggal 4 Bulan Agustus 2017.</p> <p>7. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor: 014/JIP/SPH-BC/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, perihal Permohonan Penawaran Harga Kerjasama Penyambungan Serat Optik ke Gedung (Fiber to The Building/ FTTB).</p>
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 44 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor: 018/JIP/SPH-BC/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, perihal Permohonan Penawaran Harga Kerjasama Penyambungan Serat Optik ke Gedung (Fiber to The Building/ FTTB).
9. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor: 004/JIP/SPH-BC/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, perihal Permohonan Penawaran Harga Kerjasama Penyambungan Serat Optik ke Gedung (Fiber to The Building/ FTTB).
- 10.1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Material On Site, PT. Ardena Cakra Buana (ACB) Nomor SPK: 021/JIP/SPK/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur GPON.

7. Membebaskan terdakwa Abdul Hadi H.S untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Abdul Hadi H.S., M.M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa;

Disita dari Lusiana Herawati 16 Mei 2023.

Halaman 45 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan PMP sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- dari APBDP Pemprov DKI tahun 2015 yang berisikan: a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT JAKPRO kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor: 027/UT2000/110/XI/2015 perihal permohonan pencairan pemenuhan PMP sebesar Rp. 1.5T dari APBD-P Tahun 2015 tertanggal 12 November 2015 yang ditandatangani oleh Dirut PT Jakpro Abdul Hadi Hs. b. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi dari PT. JAKPRO untuk penerimaan setoran Penyertaan Modal Pemprov DKI Jakarta untuk Pemenuhan modal dasar PT Jakpro sebesar Rp. 1.5T dari Pemprov DKI Jakarta tertanggal 11 November 2015 yang ditandatangani oleh Dirut PT. Jakarta Propertindo saudara Abdul Hadi Hs. c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: 004/UT2000/121/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dirut PT. Jakpro saudara Abdul HADI Hs dan Dirkeu PT. Jakpro saudara Lim Lay Ming. d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pengeluaran Pembiayaan (SPP-LS Pengeluaran Pembiayaan) Nomor: 00520/SPP/1.20.380/XII/2015 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudari Tien Sumartini selaku Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00522/SPM/1.20.380/XII/2015 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 46 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SPD) Nomor: 0004975/SP2D/XII/2015 Tahun 2015

tertanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudari Yanni Suryani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

h. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0009636/SPD/XI/2015 Tahun 2015 tertanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kepala BPKAD.

i. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 nomor: DPA-SKPD 1.20.380 380 00 000 6 2, Disahkan di Jakarta dengan nomor: 741/DPPA/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kepala BPKAD.

2. 1 (satu) bundle fotocopy surat Nomor : 05/NA/PI-DKI/REKOM-JAKPRO/XI/2015, tanggal 16 November 2015 perihal Rekomendasi PMD Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT. JAKPRO.

3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT JAKPRO kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor: 075/UT2000/110/XI/2015 perihal Studi Kelayakan Pentertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta Tahun 2015 pada PT Jakarta Propertindo.

4. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2080 Tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015.

5. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2080 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015.

Halaman 47 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 644 Tahun 2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2015.
7. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2241 tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang pengangkatan Ir. NUR ALI NUGROHO, MAPPI (Cert) sebagai penasihat Investasi Daerah.
8. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2698 tahun 2015, tanggal 8 Desember 2015 tentang pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada PT. JAKPRO tahun Anggaran 2015.
9. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank DKI periode tanggal 15 Desember 2015 s/d 15 Deseber 2015 No. AC : 139-02-01605-4, tanggal 20 Maret 2023.
- 10.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2030 Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 11.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disita dari Ramadhiansyah Rambe tanggal 16 Juni 2023

2. 1. 1 (satu) bundle Fotocopy Studi Kelayakan Peneyertaan Modal Pemerintah (PMP) Melalui APBN-DKI Jarkarta Propertindo Oktober 2015.
2. 1 (satu) bundle Fotocopy penetapan nilai penyertaann modal dan penyerahan asset Pemprov DKI Jakarta kepada PT. TJ (BUMD) melalui Inbreg dilakukan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan.
3. 1 (satu) bundle Fotocopy Struktur, Job Desc, Capain Kinerja dan Rencana Kerja (Serah terima dari Lim Lay Ming), 28 Agustus 2018.
4. 1 (satu) bundle Fotocopy pembentuka Holding BUMD DKI

Halaman 48 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta (Skema : Inbreng Saham Pemprov DKI kepada PT. JAKPRO) tanggal 10 November 2015.
5. 1 (satu) bundle Fotocopy rekomendasi penyertaan modal daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT. JAKPRO Nomor : 04/NA/PI-DKI/REKOM-JAKPRO/XI/2015, tanggal 16 Nov 2015.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy penyampaian Laporan Ringkasan Penerimaan dan Penggunaan Dana PMP PT Jakpr kepada Kepala Badan Pembinaan BUMD Prov DKI Jakarta Nomor: 110/KU0000/II/2023/0007, tanggal 8 Februari 2023.
 7. 30 (tigapuluh) halaman fotocopy Studi Kelayakan Kegiatan untuk CAPEX untuk Perusahaan INBRENG (Sinergy BUMD/BUMD) 2015.
 8. 1 (satu) bundle Fotocopy Review rencana penguranga modal pemerintah pada PT. JAKPRO , tanggal 12 Nov 2015.
 9. 1 (satu) bundle Fotocopy Studi Kelayakan Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT Jakpro kepada Kepala BPKAD Prov. DKI Jakarta Nomor: 075/UT2000/110/XI/2015. 24 Nov 2015.
 10. 1 (satu) bundle Fotocopy Penyampaian Studi Kalayakan PMP melalui PBD-DKI Jakarta kepada PT Jakpro, kepada Kepala BPKAD Pemprov DKI Jakarta Nomor: 008/UT2000/110/XI/2015, 5 Nov 2015.
 11. 2 (dua) lembar Fotocopy laporan monitoring pelaksanaan proyek atau kegiatan atas penggunaan dana PMD kepada BUMD dan PT PATUANG Pemprov DKI Jakarta per Desember 2022.
 12. 3 (tiga) lembar Fotocopy daftar dokumen 12 kegiatan PMD Pemprov tahun 2015.
 13. 5 (lima) lembar Fotocopy Dokumen detail serapan Investasi pada proyek properti, Infrastruktur, Utilitas dari 2013 s/d 2022.
 14. 4 (empat) lembar Fotocopy rencana penggunaan dana Realokasi PT. JAKPRO tahun 2015.
 15. 8 (delapan) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance:

Halaman 49 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 5.006.429.793.48.
17. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 87.559.263.919.60.
18. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 54.528.443.524.29.
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 5.535.869.011.76.
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 5.583.012.907.92.
21. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 3.001.795.699.76.
22. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 3.251.638.160.96.
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 7.101.992.440.83.
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 7.070.915.116.67.
25. 9 (sembilan) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 2.122.745.622.71.
26. 7 (tujuh) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 2.649.877.906.96.
27. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode

Halaman 50 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance:

- 8.035.804.956.95.
28. 2 (dua) lembar Fotocopy koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 8.957.854.725.37.
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mega periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 150.205.607.88.
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mega periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 165.561.247.18.
31. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808165752 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
32. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808165752 periode 1 Agustus-31 Agustus 2018.
33. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808170004 periode 1 Agustus-31 Agustus 2018.
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808170004 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
35. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808006126 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
36. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808006126 periode 1 Agustus-31 Agustus 2018.
37. 1(satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 30202000011 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
38. 1(satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 30202000011 periode 1 Agustus - 31 Agustus 2018.
39. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BCA No Rek: 581-5000789 periode 30 Juni - 31 Juli 2018.
40. 1(satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank BCA No Rek: 581-5000789 periode 30 Juli - 31 Agustus 2018.
41. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening koran Bank BCA No Rek: 686-093399 periode 30 Juni - 31 Juli 2018.
42. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening koran Bank BCA No Rek: 686-093399 periode 30 Juli -31 Agustus 2018.

Halaman 51 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0191635599
Periode tanggal 01-07-2018 s/d 31-07-2018.
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0191635599
Periode tanggal 01-05-2013 s/d 31-07-2018.
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0198277523
Periode tanggal 14-05-2013 s/d 06-09-2018.
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank BJB No rek
0022181769001 periode 1 Juli – 31 Juli 2018.
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank BJB No rek
0022181769001 ; periode 1 Agustus – 31 Agustus 2018.
48. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BJB No rek 0056537074001 ;
periode 1 Juli – 31 Juli 2018.
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank BJB No rek
0056537074001 ; periode 1 Agustus – 31 Agustus 2018.
50. 1(satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank OCBS NISP No rek
624010099999 periode 1 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018.
51. 1(satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank OCBS NISP No rek
624010099999 periode 1 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018.
52. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring
Realisasi Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD)
per 30 Juni 2018 Nomor : 037/UT2000/110/VII/2018 tanggal 17
Juli 2018.
53. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring
Realisasi Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD)
Triwulan IV 2019 Nomor : 081/UT0000/110/VII/2018 tanggal 24
Januari 2020.
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Momitoring Pelaksanaan
tugas Proyek/Kegiatan atas penggunaan dana penyertaan
modal Daerah (PMD) tahun 2006 s/d 2016 Kepada PT.
JAKPRO per 30 April 2017, Mei 2017.
55. 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Monitoring Penggunaan
Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) Nomor :
071/UT2000/110/IV/2016, taggal 29 April 2016.
56. 4 (empat) lembar Fotocopy Laporan Monitoring Realisasi
Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31

Halaman 52 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 031/UT2000/110/VII/2017, tanggal 16 Agustus

2017.

57. 1 (satu) bundle Fotocopy Tanggapan atas surat Bareskrim Polri Nomor: 110/KU0000/IV/2023, tanggal 19 April 2023.
58. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU1000-JI-1512-00011, tanggal 15-12-2015.
59. 2 (dua) lembar FotocopyPersetujuan Dewan Komisaris Nomor: 004/DK-JP/Pst/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
60. 2 (dua) lembar Fotocopy surat Repräsentasi atas studi kelayaka penyertaan modal daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2916 pada PT. JAKPRO Nomor : 012/UT2000/110/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015.
61. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27-04-17.
62. 1 (satu) bundle Fotocopy bukti Journal pembayaran Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28-07-2017.
63. 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Pinjaman Nomor Jakpro: 005/UT2000/107/IV/2017 dan Nomor: 003/PT. JIP/P/IV/2017 PT. JIP, tanggal 25 April 2017.
64. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Nomor: 002/UT2000/111/VI PT. JAKPRO Nomor: 002/UT2000/V111/VII/2018, tanggal 10 September 2018.
65. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Nomor: 001/UT2000/111/VII/2016 PT. JAKPRO, tanggal 28 Juli 2016.
66. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO (Perseroda) Nomor : 152/UT0000/111/II/2020 PT. JAKPRO, tanggal 20 Februari 2016.
67. 3 (tiga) lembar Fotocopy Review Surat Permohonan Pinjaman Pemegang Saham Nomor : 185/JIP/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Nomor : 071/JIP/II/2017, tanggal 16 Februari 2017.
69. 1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Perubahan Struktur Organisasi PT. JAKPRO Nomor :

Halaman 53 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
002/UT2000/111/IV/2018, tanggal 25 April 2015.

70. 1 (satu) bundle Fotocopy AKTA Notaris berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT. JAKPRO Nomor : =1= tanggal 4 Juni 2008.
71. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Nomor : 003/UT2000/111/XI/2018, tanggal 19 November 2018.
72. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank DKI Cab. Balaikota 1DR-08-16575-2, tanggal 31 Desember 2015.
73. 1 (satu) Bundle Fotocopy Studi Kelayakan Kegiatan Capek untuk Perusahaan Inbreng (Sinergy BUMD/BUMN), tahun 2015.
74. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Jurnal Penerimaan Nomor : JI-1809-00128, tanggal 17-09-2018.
75. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Jurnal Penerimaan Nomor : JI-1811-00090, tanggal 13-11-2018.
76. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU2000-JI-1612-00047, tanggal 30 Desember 2016.
77. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU1000-JI-1512-00016, tanggal 23 Desember 2015.
78. 1 (satu) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Ringkasan Penerimaan Dana PMD PT. JAKPRO s/d Juni 2021 Nomor : 110/UT/0000/VIII/2021/0280, tanggal 12 Agustus 2021.
79. 3 (tiga) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan I Nomor : 021/UT/0000/110/V/2020, tanggal 14 Mei 2020.
80. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan IV Nomor : 081/UT/0000/110/II/2020, tanggal 24 Januari 2020.
81. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan III Nomor : 048/UT/0000/110/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019.
82. 3 (tiga) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan II Nomor : 075/UT/0000/110/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019.
83. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD)

Halaman 54 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id per 31 Maret 2019 Nomor : 016/UT/2000/110/IV/2019,

tanggal 18 April 2019.

84. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Desember 2018 Nomor : 064/UT/2000/110/II/2019, tanggal 28 Januari 2019.

85. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 30 Juni 2018 Nomor : 064/UT/2000/110/VII/2019, tanggal 17 Juni 2019.

86. 1 (satu) bundle Fotocopy AKTA Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO Nomor : 3, tanggal 8 Mei 2017.

87. 1 (satu) bundle Fotocopy AKTA Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO Nomor : 04, tanggal 20 Juni 2016.

88. 4 (empat) lembar Fotocopy Permohonan Pencairan Pemenuhan PMP sebesar Rp.1.500.000.000.000,- dari APBD-P tahun 2015 Nomor : 027/UT2000/110/XI/2015, tanggal 12 November 2015.

89. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU1000-JI-1512-00011, tanggal 15-12-2015.

90. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank DKI 108-08-16575-2 periode 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015, tanggal 31 Desember 2015.

91. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28-07-2017.

92. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27-04-2017.

93. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1603-00087, tanggal 17-03-2016.

94. 6 (enam) lembar Fotocopy data rekafitulasi pinjaman yang diberikan PT. JAKPRO kepada PT. JIP periode 31 Desember 2014 s/d 2018.

95. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor :

Halaman 55 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU1009-JV-1510-00005, tanggal 02-10-2015.

96. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta pernyataan keputusan pemegang Saham diluar rapat PT. JIP No. 5, tanggal 16 April 2018.
97. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Nomor: KU2000-BK-1508-00109, tanggal 24-04-2017.
98. 1(satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro No. BJ 716380, tanggal 24 Agustus 2015.
99. 1(satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 135/JIP/Srt/VII/2015, perihal Proyeksi Proyek (Laba rugi dan Arus Kas, tanggal 18 Agustus 2015.
- 100.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor : KU2000-VC-1508-00002, tanggal 24 Agustus 2015.
- 101.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Dana talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor: KU2000-1508-00002, tanggal 20 Agustus 2015.
- 102.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK PT. JIP Nomor : 5/KU2000-103/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015.
- 103.2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK Nomor : 135/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015.
- 104.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 002/DEKOM-JIP/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015.
- 105.2 (dua) lembar Fotocopy Risala Rapat Dewan Direksi PT. JAKPRO, tanggal 06 Agustus 2015.
- 106.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Dana Talangan Proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU1000-JV-1508-00123, tanggal 21 Agustus 2015.
- 107.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi permohonan persetujuan Dewan Komisaris untuk penambahan setoran modal dan pengajuan fasillitas pembiayaan ke Bank Nomor : 124/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015.
- 108.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan persetujuan Dewan

Halaman 56 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris untuk penambahan setoran modal dan pengajuan fasilitas pembiayaan ke Bank Nomor: 124/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015.

109.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 002/DEKOM-JIP/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015.

110.4 (empat) lembar Fotocopy Risala Rapat Dewan Direksi PT. JAKPRO permohonan pemberian modal kerja proyek TIK. PT. JIP, tanggal 06 Agustus 2015.

111.7 (tujuh) lembar Fotocopy Rencana Proyek TIK di Kuartal Ketiga tahun 2015 dan Kebutuhan Modal Keraja.

112.1 (satu) bundle Fotocopy Perjanjian Pekerjaan antara PT. TGM dengan PT. JIP No: 0001/PPJ-SACME /TGM-XYZ/XX-2015, tanggal 14 Agustus 2015.

113.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-058-00016-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

114.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-059-00015-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

115.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-060-00009-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

116.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-061-00009-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

117.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-062-00017-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

118.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-063-00021-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

119.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-064-00024-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

120.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-065-00022-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

121.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-066-00023-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

122.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-067-00007-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

123.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-068-00018-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

Halaman 57 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-069-00001-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 125.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-70-00014-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 126.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-71-00005-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 127.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-72-00004-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 128.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-73-00019-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 129.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-074-00012-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 130.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-075-00013-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 131.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-076-00008-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 132.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-078-00003-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 133.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-078-00003-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.
- 134.1 (satu) lembar Fotocopy lampiran daftar nilai
Telecommunication Infrastructure.
- 135.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman Sementara
untuk Proyek TIK Nomor : ... /JIP/Srt/IX/2015, tanggal 30
September 2015.
- 136.4 (empat) lembar Fotocopy Surat pemberitahuan persetujuan
Kredit (SPPK) An. PT. JIP Nomor : 1706/GKK/IX/2015.-
- 137.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi surat masuk permohonan
pinjaman sementara untuk proyek TIK Nomor :
126/JIP/Srt/IX/2015, tanggal 3 September 2015.
- 138.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Memo Dana Talangan PT.
JIP U/Proyek PT.TIK Nomor : KU2000-1510-00001, tanggal 08
Oktober 2015.
- 139.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Dana
Talangan PT. JIP U/Proyek PT. TIK Nomor : KU1000/-JV-1510-

Halaman 58 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00046, tanggal 08 Oktober 2015.

140.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 011/DK-JP/Pst/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015.

141.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan PT. JIP U/Proyek PT. TIK Nomor : KU2000-VC-1510-00001, tanggal 08 Oktober 2015.

142.1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank DKI No. BJ 716398, tanggal 20-10-2015.

143.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Nomor : KU2000-BK-1510-00102, tanggal 20-10-2015.

144.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU1000-JO-1510-00115, tanggal 30 Oktober 2015.

145.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-JO-1603-00087, tanggal 17 Maret 2016.

146.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Memo Surat Persetujuan Komisaris tentang pemberian fasilitas pinjaman modal kerja PT. JIP Nomor : 11/VP/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.

147.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-JO-1603-00087, tanggal 17 Maret 2016.

148.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-VC-1603-00003, tanggal 15 Maret 2016.

149.1 (satu) lembar Fotocopy lternal Memo Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-VC-1603-00003, tanggal 15 Maret 2016.

150.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : ... , tanggal ... ,

151.2 (dua) lembar Fotocopy Memo Permohonan Persetujuan Pinjaman Sementara PT. JIP untuk Proyek TIK Nomor : 01/KU2000/103/III/2016, tanggal 10 Maret 2016.

Halaman 59 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat Permohonan Pinjaman Sementara untuk Proyek TIK Nomor : 071/JIP/Srt/II/2016, tanggal 29 Februari 2016.
- 153.10 (Sepuluh) lembar Fotocopy Rencana Proyek PT. JIP tahun 2016.
- 154.1 (satu) lembar Fotocopy Kontarak Kerjasama PT. DAYA MITARA TELEKOMUNIKASI dan PT. JAKPRO (PT. JIP).
- 155.4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. DAYA MITARA TELEKOMUNIKASI dengan PT. JIP Nomor : DTM.0331/PM2/DKA-a1000000/VI/2016, tanggal 12 Januari 2016.
- 156.1 (satu) lembar Fotocopy Risala Rapat Penunjukan Mitra Pekerjaan SACME Nomor : (...)/PM2/DMT-DK-120000a1000000/V/2015, tanggal 11 Januari 2016.
- 157.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 011/DK-JP/Pst/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015.
- 158.5 (lima) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit (SPPK) Nomor : 0263/GKK/III/2016, tanggal 29 Februari 2016.
- 159.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor : KU2000-JV-1603-00063 berdasarkan Memo-01/KU2000/103/III/2016, tanggal 16 Maret 2016.
- 160.1 (satu) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Uang Muka Investasi ke PT. JIP untuk Preyek TIK Nomor : KU2000-JO-1602-00002, tanggal 1 Februari 2016.
- 161.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran. Uang Muka Investasi ke PT. JIP untuk Preyek TIK Nomor : KU2000-BK-1602-00002, tanggal 01-02-2016.
- 162.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Uang Muka Investasi ke PT. JIP untuk Preyek TIK Nomor : KU2000-VC-1601-00005, tanggal 26 Januari 2016.
- 163.1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan Persetujuan Anggaran Nomor : KU2000-VC-1601-00005, tanggal 16 Januari 2016.
- 164.2 (dua) lembar Fotocopy Memo Permohonan Persetujuan Pinjaman Sementara yang akan di Konversikan menjadi

Halaman 60 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekuitas kepada PT. JIP terkait Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor : 01/KU0000/103/II/2016, tanggal 26 Januari 2016.
- 165.1(satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 025/JIP/Srt/II/2016, permohonan pinjaman sementara untuk proyek TIK, tanggal 21 Januari 2016.
- 166.1(satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman sementara untuk proyek TIK Nomor : 025/JIP/Srt/II/2016, tanggal 21 Januari 2016.
- 167.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 001/DEKOM-JP/II/2016, tanggal 13 Januari 2016.
- 168.9 (sembilan) lembar Fotocopy Rencana Proyek PT. JIP di Kuartal Pertama Tahun 2016.
- 169.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Uang Muka Inverstasi Ke PT. JIP untuk proyek TIK Nomor : KU2000-JV-1601-00086, tanggal 27 Januari 2016.
- 170.1 (satu) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27 April 2017.
- 171.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran. Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-BK-1704-00115, tanggal 27 April 2017.
- 172.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Pengeluaran. Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-VC-1704-00001, tanggal 05 April 2017.
- 173.1 (satu) lembar Fotocopy lternal Memo Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU6000-1704-00001, tanggal 05 April 2017.
- 174.12 (dua belas) lembar Fotocopy Permohonan persetujuan pembelian pinjaman pemegang saham Tahun 2017 serta pencairannya kepada PT. JIP untuk proyek Teknologi Komunikasi dan Informatika Nomor : 004/KU4000/103/III/2017,

Halaman 61 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 27 Maret 2017.

- 175.1 (satu) bundle Fotocopy Permohonan Persetujuan Pinjaman Subordinasi Proyek Micro/Macro Cell, Subducting, GPON, tanggal 8 Maret 2017.
- 176.4 (empat) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 055/JIP/III/2017, permohonan pinjaman pemegang saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi tahun 2017, tanggal 30 Maret 2017.
- 177.2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor: 085/JIP/VI/2017, Riview Surat permohonan pinjaman pemegang saham tahun 2017, tanggal 04 April 2017.
- 178.3 (tiga) lembar Fotocopy Indikasi Penawaran Fasilitas Kredit Nomor : 0443/GKK/III/2017, , tanggal 31 Maret 2017.
- 179.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 517/JIP/XII/2016, permohonan pinjaman pemegang saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi awal tahun 2017, tanggal 13 Desember 2016.
- 180.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman pemegang saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi awal tahun 2017 Nomor : 517/JIP/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.
- 181.1 (satu) lembar Fotocopy Tanggapan Dewan Komisaris atas rencana pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP Nomor : 006/DK-JP/Pst/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
- 182.2 (dua) lembar Fotocopy Tanggapan Permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham pada PT. JIP Nomor : 037/UT2000/110/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.
- 183.5 (lima) lembar Fotocopy permohonan tanggapan pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi komunikasi untuk tahun Anggaran 2017 Nomor : 004.01/DK-JP/Srt/II/2017, tanggal 28 Februari 2017.
- 184.5 (lima) lembar Fotocopy Risala Rapat Pembahasan RKAP PT. JAKPRO Tahun 2017, tanggal 17 Januari 2016.
- 185.4 (empat) lembar Fotocopy bukti Journal Voucher. Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi

Halaman 62 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. JIP Nomor : KU2000-JV-1704-00111, tanggal 05-04-2017.

186.1 (satu) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28 Juli 2017.

187.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : KU2000-BK-1707-00075 tanggal 28 Juli 2017.

188.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : KU6000-VC-1707-00001, tanggal 4 Juli 2017.

189.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Permohonan pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : /KU6000-1707-00001, tanggal 17 Juli 2017.

190.3 (tiga) lembar Fotocopy Meno permohonan pencairan pinjaman pemegang saham tahap II kepada PT. JIP untuk proyek Teknologi dan Informatika Nomor : 012/KU4000/103/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017.

191.6 (enam) lembar Fotocopy perjanjian pinjaman Nomor Jakpro: 565/UT2000/107/IV/2017 Nomor JIP: 003/JIP/P/IV/2017, tanggal 25 April 2017.

192.5 (lima) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher pinjaman pemegang saham tahap II kepada PT. JIP untuk proyek Teknologi dan Informatika Nomor : KU1000-JV-1508-00123, tanggal 21 Agustus 2015.

193.7 (tujuh) lembar Fotocopy perjanjian pinjaman Nomor Jakpro : 001/UT2000/107/IV/2018 Nomor JIP : 002/JIP/P/IV/2018, tanggal 03-04 2018.

194.2 (dua) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran JV-1804-00002 pinjaan sementara ke PT. JIP sebesar Rp. 100 Miliar Nomor : JO-1804-00008, tanggal 04-04-2018.

195.6 (enam) lembar Fotocopy Memo permohonan persetujuan

Halaman 63 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberian pinjaman sementara kepada PT. JIP sebesar Rp. 100 Miliar untuk kebutuhan dana pelunasan kredit modal kerja kepada Bank DKI Nomor : 013/KU6000/103/III/2018, tanggal 27 Maret 2018.
- 196.3 (tiga) lembar Fotocopy permohonan pinjaman untuk pelunasan KMK Bank DKI Nomor : 198/JIP/Srt/III/2018, tanggal 26 Maret 2018.
- 197.7 (tujuh) lembar Fotocopy surat persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPP) Nomor : 0026.GKK/II/2018.
- 198.1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor : 67, tanggal 29 Nopember 2016.
- 199.4 (empat) lembar Fotocopy pelaporan atas rencana pemberian pinjaman sementara kepada PT. JIP Nomor : 001/UT2000/110/IV/2018, tanggal 4 April 2018.
- 200.1 (satu) bundle Fotocopy Perjanjian Pinjaman Nomor JAKPRO : 001/UT2000/107/VIII/2018, Nomor JIP : 004/JIP/P/VIII/2018, tanggal 02-08-2018.
- 201.1 (satu) lembar Fotocopy Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ke PT. JIP Nomor : 392/JIP/IX/2016, tanggal 30 September 2016.
- 202.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 374/JIP/IX/2016, tanggal 08 September 2016.
- 203.1 (satu) bundle AKTA Notaris Perjanjia Kredit Nomor : 67, tanggal 29 November 2016.
- 204.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan surat pernyataan penjamin Bilyet Deposito Nomor : 441/JIP/XI/2016, tanggal 16 November 2016.
- 205.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 440/JIP/SP/XI/2016, tanggal 3 November 2016.
- 206.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan persetujuan komisaris untuk fasilitas pembiayaan perbankan Nomor : 438/JIP/XI/2016, tanggal 2 November 2016.
- 207.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujua Kredit (SPPK) Nomor : 1195/GKK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016.

Halaman 64 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 004/DK-JP/Pst/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
- 209.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pemegang Saham PT. JIP Nomor : 445/JIP/XI/2016 tanggal 4 November 2016.
- 210.2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 004/DK-JP/Pst/X/2016 tanggal ... Oktober 2016.
- 211.3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Serkuer Para Pemegang Saham PT. JIP, tanggal 11 November 2016.
- 212.5 (lima) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 1114/GKK/IX/2016, tanggal 23 September 2016.
- 213.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Pengembalian pokok dana talangan dari PT. JIP untuk keperluan proyek TIK-IM Nomor : 095/UT2000/110/XI/2015, tanggal 23 Desember 2015.
- 214.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Penerimaan Nomor : KU2000-BM-1512-00003, tanggal 15 Desember 2015.
- 215.2 (dua) lembar Fotocopy Tagihan Dana Talangan PT. JIP atas Pembayaran Proyek TIK Nomor: 095/UT2000/110/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015.
- 216.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU1000-JO-1508-00131, tanggal 26 Agustus 2015.
- 217.3 (tiga) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-BK-1508-00109, tanggal 24 Agustus 2015.
- 218.2 (dua) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor : KU2000-VC-1508-00002, tanggal 20 Agustus 2015.
- 219.4 (empat) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan pengembalian dana talangan proyek TIK-PT. JIP berdasarkan Memo-01/KU1000/103/III/2016 Nomor : KU1000-JI-1612-00047, tanggal 30 Desember 2016.
- 220.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank pengembalian dana

Halaman 65 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal proyek TIK-PT. JIP berdasarkan Memo-01/KU1000/103/III/2016 Nomor : KU1000-BM-1612-00015, tanggal 13 Desember 2016.
- 221.8 (delapan) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Desember 2016 s.d 26 Desember 2016 Account No. 103000199155.
- 222.4 (empat) lembar Fotocopy surat permohonan setoran modal kepada dirut PT. JAKPRO Nomor : 039/JIP/DIR/I/2018, tanggal 19 Januari 2018.
- 223.1 (satu) bundle Fotocopy surat permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP sebesar terkait rencana proyek GPON Rp. 118.341.000.000,- Nomor : 113/OP2000/103/V/2018, 17 Mei 2018.
- 224.1 (satu) bundle Fotocopy permohonan persetujuan pemberian pinjaman sementara kepada PT. JIP Rp. 100 Miliar untuk kebutuha dana pelunasa kredik modal kerja (KMK) kepada Bank DKI Nomor : 013/KU6000/103/III/2018, tanggal 27 Maret 2018.
- 225.3 (tiga) lembar Fotocopy surat keputusan para pemegang Saham (KPPS) yang berkekuatan sama dengan RUPS PT. JIP, tanggal 21 Desember 2015.
- 226.1 (satu) bundle Fotocopy Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja- Kredit Agunan Tunai/ Cash Collateral Nomor : 06, tanggal 06-11-2015.
- 227.1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris antara PT. JIP dengan Bank DKI. Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja- Kredit Agunan Tunai/Cash Collateral Nomor : 06, tanggal 06-11-2015.
- 228.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan pencairan DPO170001 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 078644 November 2018 Nomor : JI-1811-00090, tanggal 13 November 2018.
- 229.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Penerimaan pencairan DPO170001 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 078644 Nomor : BM-181100090, tanggal 13 November 2018.
- 230.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran pencairan

Halaman 66 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DPO170001 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 078644

Nomor : JO-1811-00411, tanggal 13 November 2018.

231.3 (tiga) lembar Fotocopy Pencairan Deposito Nomor : 029/UT2000/110/XII/2018, tanggal 12 Nopember 2018.

232.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan pencairan DPO170004 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 013969 (Breakable) 17/9/2018 Nomor : JI-1809-00128, tanggal 17 September 2018.

233.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Penerimaan pencairan DPO170004 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 0139 Nomor : BM-180900119, tanggal 17 September 2018.

234.3 (tiga) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran DPO170004 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 013969 Nomor: JO-1809-00436, tanggal 29 September 2018.

235.3 (tiga) lembar Fotocopy Pencairan Deposito Nomor : 024/UT2000/110/IX/2018, tanggal 14 September 2018.

236.1 (satu) bundle Fotocopy Permohonan Bantuan Pinjaman Modal Kerja Proyek Menara Telekomunikasi IBS Nomor : 336/JIP/Srt/VIII/2016, tanggal 09 Agustus 2016.

237.2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan pinjaman pemegang Saham dan Rencana pinjaman perbankan untuk Investasi awal tahun 2017 Nomor : 517/JIP/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.

238.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat Permohonan pinjaman pemegang Saham dan Rencana pinjaman perbankan untuk Investasi awal tahun 2017 Nomor : 517/JIP/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.

239.5 (lima) lembar Fotocopy Risalah Rapat Pembahasan RKAP PT. JAKPRO tahun 2017, tanggal 17 Januari 2017.

240.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Nomor : 071/JIP/II/2017, tanggal 16 Februari 2016.

241.5 (lima) lembar Fotocopy Permohonan tanggapan atas pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek telekomunikasi untuk tahun anggaran 2017 Nomor : 004.01/DK-JP/Srt/II/2017, tanggal 22 Februari 2017.

Halaman 67 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242.1 (satu) lembar Fotocopy Tanggapan Dewan Komisaris Permohonan rencana pemberian pinjaman pemegang saham pada PT. JIP Nomor : 037/UT2000/110/III/2017, tanggal 15 Maret 2017.
- 243.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham pada PT. JIP Nomor : 006/DK-JP/Srt/III//2017, tanggal 22 Maret 2017.
- 244.1 (satu) lembar Fotocopy Dukungan atas aksi Korporasi terkait pinjaman Subordinasi Nomor : 003/DEKOM/-JIP/III/2017, tanggal 27 Maret 2017.
- 245.6 (enam) lembar Fotocopy Memo permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham tahun 2017serta pencairannya kepada PT. JIP untuk proyek teknologi komunikasi dan Informatika Nomor : 004/KU4000/103/III/2017, tanggal 27 Maret 2017.
- 246.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman pemegang Saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi tahun 2017 Nomor : 155/JIP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017.
- 247.1 (satu) lembar Fotocopy Jadwal Penarikan Pinjaman Subordinasi Pemegang Saham, tanggal 30 Maret 2017.
- 248.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi permohonan pinjaman pemegang Saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi tahun 2017 Nomor : 155/JIP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017.
- 249.1 (satu) lembar Fotocopy Review surat permohonan pinjaman pemegang Saham Nomor : 185/JIP/IV/2017, tanggal 04 April 2017.
- 250.1 (satu) lembar Fotocopy Disposi Review surat permohonan pinjaman pemegang Saham Nomor : 185/JIP/IV/2017, tanggal 30 Maret 2017.
- 251.3 (tiga) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Piutang Afiliasi Nomor : KU6000-VC-1704-00001, tanggal 05 April 2017.
- 252.1 (satu) lembar Fotocopy perjanjian pinjaman PT. JIP No Jakpro : 005/UT2000/107/IV/2017 dan No JIP

Halaman 68 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
003/JIP/IV/2017 25 April 2017.

- 253.1 (satu) lembar Fotocopy Bilyer Giro Nomor : CL093465, tanggal 27 April 2017.
- 254.2 (dua) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Piutang Afiliasi Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27 April 2017.
- 255.5 (lima) lembar Fotocopy permohonan pencairan tahap II Nomor : 318/JIP/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017.
- 256.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pencairan Nomor : KU4000/103/VII/2017, tanggal ... Juli 2017.
- 257.1 (satu) lembar Fotocopy internal memo Nomor : KU6000-1704-00001, tanggal 14 Juli 2017.
- 258.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher pinjaman pemegang Saham kepada PT. JIP untuk Proyek Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Tahap II 2017 Nomor : KU2000-JV-1715-0051, tanggal 18 Juli 2017.
- 259.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran pinjaman pemegang Saham kepada PT. JIP untuk Proyek Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Tahap II 2017 Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28 Juli 2017.
- 260.2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran pinjaman pemegang Saham kepada PT. JIP untuk Proyek Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Tahap II 2017 Nomor : BK-1718-00075 tanggal 28 Juli 2017.
- 261.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan perpanjangan pinjaman Nomor : 273/JIP/Srt/IV/2018, tanggal 18 April 2018.
- 262.8 (delapan) lembar Fotocopy Permohonan persetujuan Addendum perjanjian pinjaman antara PT. JIP atas pinjaman proyek Teknologi Komunikasi dan Informatika (GPON Tower Telco dan Subdukting) serta pelaporan progress Teknologi Komunikasi dan Informatika Nomor : 025/KU6000/103/V/2018, tanggal 21 Maret 2018.
- 263.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (PKS) No : TGM-075-00013-0301-0815, tanggal 05 Agustus 2015.
- 264.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Proyeksi Proyek (Laba

Halaman 69 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rujukan Arus Kas) Copy persetujuan Dekom JIP, Risala Rapat Direksi Jakpro, Kontarak Payung Pembangunan 200 Site antara Triview-JIP dan 24 SPK dari Triview Nomor : 135/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015.
- 265.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK PT. JIP Nomor : 5/KU2000/103VIII/3015, tanggal 20 Agustus 2015.
- 266.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor: /KU2000-1508-00002, tanggal 20 Agustus 2015.
- 267.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-VC-0002, tanggal 20 Agustus 2015.
- 268.1 (satu) lembar Fotocopy Journal Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-JO-00131, tanggal 26 Agustus 2015.
- 269.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti KAS/BANK PENGELUARAN dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-BK-1508-00109, tanggal 24 Agustus 2015.
- 270.2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian Penggunaan Dana PMP Nomor : 029/UT2000/110/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.
- 271.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Realokasi Penggunaan PMP Nomor: UT2000/110/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015.
- 272.1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Rapat Pemegang Saham di luar rapat PT. JAKPRO, tanggal April 2015.
- 273.1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris berita acara rapat umum pemegang Saham, tanggal 20 Januari 2015.
- 274.1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Simulasi pendanaan untuk proyek penugasan, tanggal November 2015.
- 275.1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Realokasi dana PMP akuisisi PT. PALYJA, tanggal 9 November 2015.
- 276.1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Penyertan modal pemerintah DKI Jakarta tahun 2016 di PT. JAKPRO (Rapat terbatas DPRD DKI Jakarta, tanggal 10 November 2015.
- 277.1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0191635599

Halaman 70 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode tanggal 01-08-2018 s/d 31-08-2018.

278.1 (satu) bundle Fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 PT. JAKPRO dan entitas anak Nomor: 003/KU0000/121/IX/2019.

279.3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2698 tahun 2015, tanggal 8 Desember 2015 tentang pemcairan PMD pada PT. JAKPRO tahun Anggaran 2015.

280.2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2241 tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang pengangkatan Ir. NUR ALI NUGROHO, MAPPI (Cert) sebagai penasehat penasehat Invertasi Daerah.

281.1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 644 tahun 2015, tanggal 23 April 2015 tentang Penjabat diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar tahun anggaran 2015.

282.3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2080 tahun 2014, tanggal 2 Desember 2014 tentang penunjukan kuasa bendahara umum Daerah tahun anggaran 2015.

283.2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 73 tahun 2015, tanggal 20 Januari 2015 tentang perubahan atas Kepgub Nomor : 2080 tahun 2014 tentang penunjukan kuasa bendahara umum Daerah tahun anggaran 2015.

284.1 (satu) bundle Fotocopy surat Nomor : 05/NA/PI-DKI/REKOM-JAKPRO/XI/2015, tanggal 16 November 2015 perihal Rekomendasi PMD Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT. JAKPRO.

285.2 (dua) lembar Fotocopy surat rincian dokumen pelaksanaan perubagan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah Nomor DPA-SKPD 1.20.380.380.00.000.6.2, tanggal 30 Oktober 2015.

286.2 (dua) lembar Fotocopy surat rincian dokumen pelaksanaan

Halaman 71 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	perubahan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah Nomor DPA-SKPD 1.20.380.380.00.000.6.2, tanggal 30 Oktober 20151 (satu) lembar Fotocopy rekening Koran Bank DKI periode tanggal 15 Desember 2015 s/d 15 Deseber 2015 No. AC : 139-02-01605-4, tanggal 20 Maret 2023.
Disita dari Maryanti tanggal 03 Agustus 2023	
3.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Studi Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) – DKI Jakarta Kepada PT. Jakarta Propertindo Bulan Oktober 2015.
Disita dari Ir. Abdul Hadi H.S, MM tanggal 31 Agustus 2023	
4.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy berwarna Kartu tanda Penduduk Atas Nama Abdul Hadi H.S, NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3174071306570003, Kewarganegaraan : Indonesia.1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Akta Notaris Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.KN. SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00176.AH.02.01.Tahun 2015 Tanggal 16 Maret 2015, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta Infrastruktur Mandiri, Nomor: 06, tanggal 10 Desember 2015.1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Akta Notaris, Nomor: 28, tanggal 20 Januari 2015 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.101.AH.02.02-Tahun 2011, tanggal 8 November 2011, Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Nomor: 561/BL/STTD-N/2012, tanggal 25 Januari 2012, terkait Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Jakarta Propertindo.1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Akta Notaris, Nomor: 102, tanggal 30 Mei 2016 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.101.AH.02.02-Tahun 2011, tanggal 8 November 2011, Terdaftar sebagai Profesi

Halaman 72 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>Putusan Pengadilan Pasar Modal, Nomor: 561/BL/STTD-N/2012, tanggal 25 Januari 2012, terkait Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jakarta Propertindo.</p>	
<p>Disita dari Aji Rizki Yodhana, S.H., M.H. tanggal 14 September 2023</p>	
5.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Notaris, Nomor: 13, tanggal 29 Juli 2015 dari Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H, SK MENKEH & HAM RI Tgl 26 Februari 2002 Nomor : C-131 HT 03.02 Tahun 2002 SK KEPALA BPN, Tanggal 29 Oktober 2002 No: 16-X-2002, Terkait Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo.</p>
<p>Disita dari Euis Sumiati, S.E. tanggal 19 Oktober 2023</p>	
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BAST PKS No.0364. 2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BAST PKS No.086. 3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BAST PKS No.278. 4. 1 (satu) bundle fotocopy PKS ONE TIME VENDOR (OTV) PEKERJAAN SACME MACROCELL DMT.0364/PM2/DKAA 1000000/XII/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO. 5. 1 (satu) bundle fotocopy PKS ONE TIME VENDOR (OTV) PEKERJAAN MACROCELL DMT.086/PM2/DKAA1000000/III/2017 TANGGAL 3 APRIL 2017 PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO. 6. 1 (satu) bundle fotocopy PKS ONE TIME VENDOR (OTV) PEKERJAAN MACROCELL, CORE DMT.278/PM2/DKAA1000000/X/2017 TANGGAL 11 OKTOBER 2017 PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO. 7. 1 (satu) bundle Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor 06 Tanggal 10 Desember 2015. 8. 1 (satu) bundle Fotocopy Akte Pendirian PT. Jakrta Propertindo dan Perubahannya. 9. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor : 025/JIP/SRT/II/2016 Tanggal 21 Januari 2016 Perihal

Halaman 73 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen.

10.1 (satu) bundle Fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 071/JIP/SRT/III/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen.

11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 190/JIP/SRT/IX/2016 Tanggal 30 September 2015 Perihal Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen copy risalah rapat dewan Direksi PT Jakarta Propertindo, Rekapitulasi SPK yang sudah diterima dari PT Triview Geospatial Mandiri, SPPK dari Bank DKI.

12.1 (satu) bundle fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 135/JIP/SRT/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen copy Persetujuan Dewan Komisaris PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, risalah rapat dewan Direksi PT Jakarta Propertindo, Copy Kontrak Pyung Pembangunan 200 site antara Triview – JIP, Copy 24 SPK dari Triview.

13.1 (satu) bundle Fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 124/JIP/SRT/VIII/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 Perihal Permohonan Pesetujuan Dewan Komisaris Untuk Penambahan Setoran Modal dan Pengajuan Fasilitas Pembiayaan Ke Bank Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen Persetujuan Dewan Komisaris.

14.1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Direksi PT. Jakarta Propertindo Nomor : 009/UT/2000/111/IX/2016 Tanggal 11 November 2016.

15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur

Halaman 74 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 336/JIP/VIII/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 Perihal Permohonan Bantuan Pinjaman Modal Kerja Proyek Menara Telekomunikasi IBS beserta Lampiran Paparan Proyek Menara Telekomunikasi IBS.
- 16.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 008/JIP/Kpts/XI/2015 Tentang pengangkatan Sdr. CHARISTMAN DESANTO H.S. SE, MSI, AK Sebagai Vice President (VP) Keuangan Dan TIK PT. JIP Pada Tanggal 02 November 2015.
- 17.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 001/JIP/Kpts/XI/2015 Tentang pengangkatan Sdr. CHARISTMAN DESANTO H.S. SE, MSI, AK Sebagai Vice President (VP) Keuangan Dan TIK PT. JIP Pada Tanggal 02 November 2015.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Asli Surat Nomor : 226/JIP/Srt/X/2015 Prihal : Pemberitahuan Usulan Promosi Karyawan Pada Tanggal 29 Oktober 2015.
- 19.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 24/JIP/Kpts/XI/2016 Tentang pengangkatan Sdr. ANDRIE SUDARYANTO AK Sebagai CORDINATOR PROJECT PT. JIP Pada Tanggal 26 Oktober 2015.
- 20.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 03/JIP/Kpts/IV2017 Tentang pengangkatan Sdr. ANDRIE SUDARYANTO AK Sebagai KARYAWAN TETAP PT. JIP Pada Tanggal 26 April 2017.
- 21.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 016/JIP/Kpts/VIII/2016 Tentang Penetapan Penghasilan Sdr. CHARISTMAN DESANTO H.S. SE, MSI, AK Sebagai Vice President (VP) Keuangan Dan TIK PT. JIP Pada Tanggal 15 Agustus 2016.
- 22.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 14/JIP/Kpts/VIII/2016 Tentang pengangkatan Sdri. DEFIANA TARIGAN Sebagai Asisten Manager Oprasional Teknologi Informasi dan Komunikasi PT. JIP Pada Tanggal 05

Halaman 75 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 13/JIP/Kpts/VIII/2016 Tentang Pengangkatan Sdr. RICKY AFRIANTO Sebagai Manager Oprasional Teknologi Informasi dan Komunikasi PT. JIP Pada Tanggal 05 Agustus 2016.

24.2 (dua) lembar Fotocopy Risalah rapat, Permohonan pemberian modal kerja proyek TIK PT. JIP, pada tanggal 26 Februari 2016.

25.1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Asli Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, pada tanggal 6 Agustus 2019.

26.1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Asli Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, pada tanggal 6 Agustus 2019.

27.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, nomor: 038/UT2000/110/VIII/2016, tanggal 18 agustus 2016 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, beserta Laporan Hasil Audit PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Tahun 2015 dan Periode 1 Januari s/d 30 April 2016 nomor : LHA-01/UT1000/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 dengan Surat Tugas nomor : 005/UT2000/110/V/2016, tanggal 9 Mei 2016.

28.1 (satu) bundel fotocopyu Surat Direktur PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo dengan nomor: 019/JIP/Srt/I/2016, tanggal 13 Januari 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris untuk penambahan modal disetor dan fasilitas pembiayaan Bank, beserta Surat Persetujuan Dewan Komisaris nomor : 001/DEKOM-JIP/I/2016, tanggal 13 Januari 2016 dengan Papan Rencana Proyek TIK di Kuartal Pertama Tahun 2016.

29.1 (satu) bundel fotocopy dokumen INTERNAL MEMO nomor :

Halaman 76 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/PJ/2016 tanggal 17 Maret 2016, perihal Surat Persetujuan

Komisaris Tentang Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja PT. JIP.

30.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-yahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013.

31.1 (satu) bundle fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo tanggal 29 September 2015.

32.1 (satu) bundel fotocopy Materi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Jakrta Infrastruktur Propertindo Tahun Buku 2015.

33.1 (satu) bundel fotocopy AKTA Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO tanggal 20 Juni 2016 nomor 04 dengan notaris LUMASSIA SH.

34.1 (satu) bundel fotocopy AKTA Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO tanggal 8 Mei 2017 nomor 3 dengan notaris ERNI ROHAINI, SH., MBA.

35.1 (satu) bundel fotocopy Surat Direktur PT. Triview Geospacial Mandiri, tanggal 30 Desember 2015 Perihal Kemajuan Pekerjaan dan Status Penagihan Proyek Pengadaan Menara Telekomunikasi.

36.3 (tiga) lembar fotocopy Lampiran daftar nilai SPK PT. Triview Geospacial Mandiri.

37.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Site Accou- sition Site Aquisition dan Civil Mechanical dan Electrical antara P T. Triview Geospacial Mandiri dengan PT. Jakarta Infrastruktu- s Propertindo nomor : 001/PPJ-SACME/TGM-XYZ/XX-2015, tang- gal 14 Agustus 2015.

38.2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Dewan Direksi PT. Jakarta Propertindo hari Kamis 6 Agustus 2015 dengan Pimpinan Rapat Direktur Utama Abdul Hadi Hs terkait Permohonan Pemberi Modal Kerja Proyek TIK PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo.

Halaman 77 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.2 (dua) lembar fotocopy Surat dari PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo dengan nomor surat : 124/JIP/Srt/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, Perihal permohonan Persetujuan Dewan komisaris untuk Penambahan Setoran Modal dan Pengajuan Fasilitas Pembiayaan Ke Bank.

40.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris dengan nomor : 002/DEKOM-JIP/VIII/2015 tanggal 12 agustus 2015, Perihal Tindak lanjut dari atas Paparan dan Permohonan Surat Direktur Utama PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo.

41.5 (lima) lembar fotocopy Surat PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor surat : 135/JIP/Srt/VIII/2015 tanggal 18 agustus 2015, Perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK.

42.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Dewan komisais nomor : 001/DEKOM-JIP/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 terkait Tindak Lanjut dari Papran dan Permohonan Surat Direktur PT. Jakrta Infrastruktur Propertindo.

43.1 (satu) bundle fotocopy surat PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI DENGAN PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO: TSM.017/PRASITAC/PM1806114/VI/2018.

44.1 (satu) bundle fotocopy surat PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO DENGAN PT. TOWERINDO PERKASA INTI NO : 007.A/JIP/PKS/IX/2018.

45.3 (tiga) lembar fotocopy surat PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO DENGAN PT.INTAN PRIMA SEJAHTERA NO : 004A/JIP/P/VIII/2017.

46.1 (satu) bundle fotocopy surat PERJANAJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MITRRA MULTI SOLUSI DENGAN PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 0035/M2SJIP00/SACME/04/XI/2015.

47.1 (satu) lembar surat fotocopy PERMOHONAN MENJADI REKANAN KONTRAKTOR MENARA TELEKOMUNIKASI dari

Halaman 78 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO untuk PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI NO : 303/JIP/SRT/XII/2015 tanggal: 17 DESEMBER 2015.
	48.1 (satu) lembar surat fotocopy PEMBERITAHUAN TERDAFTAR REKANAN KONTRAKTOR MENARA TELKOMUNIKASI dari PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI untuk PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 15.001TSM042016 tanggal : 15 APRIL 2016.
	49.1 (satu) lembar fotocopy surat PENGAJUAN HARGA SIS/SITAC DAN CME dari PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO untuk PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI, NO : 363/JIP/SRT/VIII/2016 tanggal : 29 AGUSTUS 2016.
	50.1 (satu) lembar fotocopy surat BERITA ACARA KLARIFIKASI DENGAN NEGOSIASI dari PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI untuk PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO :TSM.101/6/SACME16.
	51.3 (tiga) lembar surat fotocopy KEPUTUSAN DIREKSI PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 32JIP/KPTS/XII/2016 tentang PEMILIHAN MITRA USAHA KERJASAMA PERSEROAN DALAM RANGKA INVESTASI JANGKA PANJANG.
	52.2 (dua) lembar surat fotocopy KEPUTUSAN DIREKSI PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 33JIP/KPTS/XII/2016 tentang PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.
	53.6 (enam) lembar fotocopy KUALIFIKASI/PEMILIHAN KONTRAKTOR PEKERJAAN PENGADAAN & PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI PELAKSANAAN TAHUN 2016.
	54.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Site Acquisition dan Civil Mechanical dan Electrical antara P T. Triview Geospatial Mandiri dengan PT. Jakarta Infrastruktus P ropertindo nomor : 001/PPJ-SACME/TGM-XYZ/XX-2015, tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 79 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>55.1 (satu) bundle fotocopy legalisir DOKUMEN PROJECT LIST PT. TSM (TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI) sebanyak 100 site kepada PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.</p> <p>56.2 (dua) lembar fotocopy Amandemen perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Jasa konstruksi Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME) Microcell Pole (MCP) dan BTS Hotel, Nomor: 0002/TBGTBG00/VEMSACMEMCP/04/VIII/2017.</p> <p>57.2 (dua) lembar fotocopy SURAT KESEPAKATAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJASAMA KONSTRUKSI DAN/ATAU NON KONSTRUKSI NO: 001/IPSJIP/VI/2015.</p> <p>58.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Manajemen PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor: 110/JIP/PM/IV/2016 tanggal 15 april 2016.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disita dari **DEFIANA TARIGAN, S.T. tanggal 19 Oktober 2023**

7.	<p>1. 1 (satu) odner hitam yang berisikan dokumen fotocopy:</p> <p>a. Dokumen File Tower Catelya Bassura dengan isi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 6 (enam) lembar Dokumen Owner Estimate. 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal. 3) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Penawaran Harga. 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi. 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang. <p>b. Dokumen File Tower Astelia Bassura dengan isi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate. 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal. 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga. 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi. 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang. <p>c. Dokumen File Ratu Prabu 2 dengan isi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate. 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal. 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga. 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi. 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 80 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dokumen File Menara Kuningan dengan isi:

- 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.
- 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.
- 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.
- 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.
- 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

e. Dokumen File Menara Graha Surveyor dengan isi:

- 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.
- 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.
- 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.
- 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.
- 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

f. Dokumen File Menara Gedung Maspion dengan isi:

- 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.
- 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.
- 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.
- 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.
- 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

g. Dokumen File Pondok Indah Tower 3 dengan isi:

- 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.
- 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.
- 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.
- 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.
- 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

h. Dokumen File Pondok Indah Tower 2 dengan isi:

- 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.
- 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.
- 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.
- 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.
- 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

i. Dokumen File Pondok Indah Tower 1 dengan isi:

- 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.
- 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.
- 3) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.
- 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.

Halaman 81 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 95) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.

Disita dari ACHMAD HIDAYAT, S.E tanggal 02 Nopember 2023

- 8.
1. 1 (satu) lembar fotocopy Email dari Adi Fitra kepada Achmad Hidayat yang berisikan Paparan BPKAD – Pendanaan PMP dan Pinjaman Daerah untuk RKAP 2016, Pada tanggal 22 Oktober 2015.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Email dari Sultan Ery kepada Achmad Hidayat yang berisikan Revisi Buku Study Kelayakan, Pada tanggal 12 Desember 2015.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Kronologis Penyertaan Modal Daerah Tahun 2015 sampai 2016.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Pendanaan PMP dan Pinjaman Daerah Untuk RKAP 2016 PT. Jakarta Propertindo, Pada tanggal 22 Oktober 2015.

Disita dari DEFIANA TARIGAN, S.T. tanggal 07 Nopember 2023

- 9.
1. 1 (satu) lembar SPK Implementasi CME area Maluku no : 001/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016.
 2. 1(satu) lembar SPK Implementasi CME area Papua Barat no : 002/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016.
 3. 1(satu) lembar SPK Implementasi CME area Nusa Tenggara Timur no : 003/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016.
 4. 1(satu) lembar SPK Implementasi CME area Sulawesi Utara no : 004/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016.

Disita dari RAMADHIANSYAH RAMBE tanggal 30 Nopember 2023

- 10.
1. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Jakarta Properindo tanggal 4 Juni 2008 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
 2. 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. JAKPRO tahun 2014.
 3. 1 (satu) Bundel rencana kerja dan anggaran kerja perusahaan (RKAP)- revisi tahun 2015 PT.Jakpro.
 4. 1 (satu) Bundel rencana kerja dan anggaran kerja perusahaan

Halaman 82 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKAP)-revisi tahun 2015 PT.Jakpro.

5. 1 (satu) Bundel berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT.Jakpro dengan Nomor Akta 28 Tanggal 20 Januari 2015 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H.,M.Kn.
6. 1 (satu) Bundel berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT.Jakpro dengan Nomor Akta 3 Tanggal 4 Februari 2015 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H.,M.Kn.
7. 1 (satu) Bundel berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT.Jakpro dengan Nomor Akta 18 Tanggal 23 Juni 2015 dengan Notaris ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.
8. 1 (satu) Bundel pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar PT.Jakpro dengan Nomor Akta 91 Tanggal 14 Juli 2015 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H.,M.Kn.
9. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT.Jakpro tahun 2016.

Disita dari AJI RISQI YODHANA, S.H., M.H. tanggal 6 Desember 2023

11. 1. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Jakarta Komunikasi, Nomor Akta 131, pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan Notaris SUTJPTO, S.H., M.Kn.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-87605.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 19 November 2008 tentang Peresetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Jakarta Komunikasi berubah nama menjadi PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, Nomor Akta 11, pada tanggal 4 Juni 2014 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
4. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Mitra Multi Solusi (M2S) dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor: 0035/M2S-JIP-00/SACME/04/XI/2015 tanggal 26 November 2015.
5. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac antara PT. M2S dengan PT. JIP yang berisikan:

Halaman 83 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-086, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 289 Nilai Rp. 415.000.000.
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-087, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 692 Nilai Rp. 415.000.000.
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-088, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 810 Nilai Rp. 415.000.000.
 - d. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-089, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 533 Nilai Rp. 415.000.000.
 - e. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-090, Tanggal 25 Februari 2016 Site Makassar 508 Nilai Rp. 415.000.000.
6. 1 (satu) bundle fotocopy Purchase Order (PO) antara PT. M2S dengan PT. JIP yang berisikan:
- a. Purchase Order Nomor: 05-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Selam Old Biaya Rp. 300.000.000.
 - b. Purchase Order Nomor: 03-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Boksit/Suasa Biaya Rp. 300.000.000.
 - c. Purchase Order Nomor: 01-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Kenanga Sari/Dr. Mansyur Biaya Rp. 300.000.000.
 - d. Purchase Order Nomor: 04-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Busi/Avros Biaya Rp. 300.000.000.
 - e. Purchase Order Nomor: 02-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Karya Kasih Biaya Rp. 300.000.000.
7. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pekerjaan Site Accousition Site Acquisition & Civil Mechanical & Electrical antara PT. Triview Geospatial Mandiri (TGM) dan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Nomor: 0001/PPJ-SACME/TGM-XYZ/XX-2015, tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 84 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>8. 1 (satu) bundle fotocopy Purchase Order (PO) antara PT. TGM dengan PT. JIP yang berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Purchase Order Nomor: 0106 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Lampung, Rp.111.553.500. b. Purchase Order Nomor: 0107 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Purwokerto Kulon, Rp.163.098.130. c. Purchase Order Nomor: 0108 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Bontang, Rp.18.110.665. d. Purchase Order Nomor: 0109 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Slawi Wetan, Rp.206.584.000. e. Purchase Order Nomor: 0106 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Patean wetan, Rp.217.722.145. <p>9. 1 (satu) bundle fotocopy kelengkapan dokumen mendirikan tower dengan Site Yogyakarta Kentungan tinggi tower 42 Meter, tipe site Green Field/Roof Top.</p> <p>10.1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Telkominfra Solusi Mandiri (TSM) nomor: 007/JIP/PKS/IX/2018 tanggal 13 september 2018.</p> <p>11.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Towerindo Perkasa Inti (TPI).</p> <p>12.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Intan Prima Sejahtera (IPS).</p> <p>13.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Intan Pratama Sejahtera (IPS).</p>
Disita dari AJI RISQI YODHANA, S.H., M.H. tanggal 6 Desember 2023	
12.	1. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PPKP Menara Sudirman dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor Ref. No. UM-203/HRL-LO/PPKP MS/VII/17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perhimpunan Penghuni Menara Kadin Indonesia dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor Ref/MGT/179.350.02(009)/MKI/V/2018, tanggal 28 Mei 2018.
3. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Menara Duta dengan PT. Jakarta Infrastruktur Properindo nomor: 001-18/MD/MDB/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
4. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Menara Antam Sejahtera dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo No:012/MAS-SPK/VII/2018 tgl 25 Juli 2018.
5. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Uji Terima antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Ardena Cakra Buana (ACB) tanggal 4 Januari 2018.
6. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Ardena Cakra Buana (ACB) tanggal 4 Bulan Agustus 2017.
7. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor: 014/JIP/SPH-BC/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, perihal Permohonan Penawaran Harga Kerjasama Penyambungan Serat Optik ke Gedung (Fiber to The Building/ FTTB).
8. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor: 018/JIP/SPH-BC/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, perihal Permohonan Penawaran Harga Kerjasama Penyambungan Serat Optik ke Gedung (Fiber to The Building/ FTTB).
9. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor: 004/JIP/SPH-BC/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, perihal Permohonan Penawaran Harga Kerjasama Penyambungan Serat Optik ke Gedung (Fiber to The Building/ FTTB).
- 10.1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Material On Site, PT. Ardena Cakra Buana (ACB) Nomor SPK: 021/JIP/SPK/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur GPON.

Halaman 86 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Lim Lay Ming

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2024 telah diajukan permohonan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana ternyata berdasarkan Akte permintaan Banding Nomor : 50/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN. JKT.PST, dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana ternyata berdasarkan Akte permintaan Banding Nomor :50/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN. JKT.PST;

Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mencabut Akte permintaan Banding Nomor :11/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN. JKT.PST, tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang bahwa tentang adanya pencabutan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 87 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2024 telah diajukan permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024 Nomor: 50/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN. JKT.PST, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan sebagaimana di dalam Memori bandingnya tanggal 15 Agustus 2024 yang telah diterima Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Hadi H.S,MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Abdul Hadi H.S.MM., oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Abdul Hadi H.S, MM., sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum bermohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan Banding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Halaman 88 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2024, sebagaimana surat tuntutan pidana yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja, dan apabila dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa Abdul Hadi, H.S adalah sebagai Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (PT. JAKPRO) periode tahun 2015 s.d 2016 pada tahun 2015 melalui saksi Agus Himawan selaku Direktur Pengembangan PT. JAKPRO mengeluarkan Surat Nomor 053/UT2000/110/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang menugaskan anak Perusahaan PT. JAKPRO yaitu PT. Jakarta Konsultindo (PT. JAKON) untuk membuat kelengkapan Proposal Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2015 antara lain *Feasibility Study / Studi Kelayakan* dari PT. JAKPRO

Halaman 89 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka penerapan pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2024, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang kesalahan terdakwa yang terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Ir. Abdul Hadi H.S., M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, dan menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Hadi H.S., M.M tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan Primair, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, maupun pidana yang dijatuhkan dan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada terdakwa, menurut majelis hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut akan

Halaman 90 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya dan semua kerugian yang timbul dalam perkara ini dinikmati oleh Terdakwa lain serta menurut Majelis Hakim pemberian pidana kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat umum serta telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan utama pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain pemidanaan adalah agar ada pengembalian uang terhadap kerugian negara, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa sepanjang mengenai lamanya hukuman penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dianggap masih terlalu ringan, yang mana uang yang dinikmati dan digunakan oleh Terdakwa diperuntukkan untuk Pendidikan anak-anak yang membutuhkannya oleh karena itu akan diperbaiki dan selengkapya atau disebutkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP. Biaya perkara pada tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan

Halaman 91 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
 - Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Abdul Hadi H.S., M.M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama"** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Lusiana Herawati 16 Mei 2023.

- | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan PMP sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- dari APBDP Pemprov DKI tahun 2015 yang berisikan:<ol style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT JAKPRO kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor: 027/UT2000/110/XI/2015 perihal permohonan pencairan pemenuhan PMP sebesar Rp. 1.5T dari APBD-P Tahun 2015 tertanggal 12 November 2015 yang ditandatangani oleh Dirut PT Jakpro Abdul Hadi Hs.b. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi dari PT. JAKPRO untuk penerimaan setoran Penyertaan Modal Pemprov DKI Jakarta |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Halaman 92 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemenuhan modal dasar PT Jakpro sebesar Rp. 1.5T dari Pemprov DKI Jakarta tertanggal 11 November 2015 yang ditandatangani oleh Dirut PT. Jakarta Propertindo saudara Abdul Hadi Hs.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: 004/UT2000/121/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dirut PT. Jakpro saudara Abdul HAdi Hs dan Dirkeu PT. Jakpro saudara Lim Lay Ming.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pengeluaran Pembiayaan (SPP-LS Pengeluaran Pembiayaan) Nomor: 00520/SPP/1.20.380/XII/2015 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudari Tien Sumartini selaku Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00522/SPM/1.20.380/XII/2015 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0004975/SP2D/XII/2015 Tahun 2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudari Yanni Suryani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- h. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0009636/SPD/XI/2015 Tahun 2015 tertanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kepala BPKAD.
- i. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman 93 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015

nomor: DPA-SKPD 1.20.380 380 00 000 6 2, Disahkan di Jakarta dengan nomor: 741/DPPA/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Heru Budi Hartono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kepala BPKAD.

2. 1 (satu) bundle fotocopy surat Nomor : 05/NA/PI-DKI/REKOM-JAKPRO/XI/2015, tanggal 16 November 2015 perihal Rekomendasi PMD Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT. JAKPRO.
3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT JAKPRO kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor: 075/UT2000/110/XI/2015 perihal Studi Kelayakan Pentertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta Tahun 2015 pada PT Jakarta Propertindo.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2080 Tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015.
5. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2080 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015.
6. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 644 Tahun 2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2015.
7. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2241 tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang pengangkatan Ir. NUR ALI NUGROHO, MAPPI (Cert) sebagai penasihat Investasi Daerah.
8. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2698 tahun 2015, tanggal 8 Desember 2015

Halaman 94 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada PT.

JAKPRO tahun Anggaran 2015.

9. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank DKI periode tanggal 15 Desember 2015 s/d 15 Desember 2015 No. AC : 139-02-01605-4, tanggal 20 Maret 2023.

10.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2030 Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015.

11.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disita dari **Ramadhiansyah Rambe tanggal 16 Juni 2023**

2.
 1. 1 (satu) bundle Fotocopy Studi Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Melalui APBN-DKI Jakarta Propertindo Oktober 2015.
 2. 1 (satu) bundle Fotocopy penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan asset Pemprov DKI Jakarta kepada PT. TJ (BUMD) melalui Inbreg dilakukan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan.
 3. 1 (satu) bundle Fotocopy Struktur, Job Desc, Capain Kinerja dan Rencana Kerja (Serah terima dari Lim Lay Ming), 28 Agustus 2018.
 4. 1 (satu) bundle Fotocopy pembentuka Holding BUMD DKI Jakarta (Skema : Inbreg Saham Pemprov DKI kepada PT. JAKPRO) tanggal 10 November 2015.
 5. 1 (satu) bundle Fotocopy rekomendasi penyertaan modal daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT. JAKPRO Nomor : 04/NA/PI-DKI/REKOM-JAKPRO/XI/2015, tanggal 16 Nov 2015.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy penyampaian Laporan Ringkasan Penerimaan dan Penggunaan Dana PMP PT Jakpr kepada Kepala Badan Pembinaan BUMD Prov DKI Jakarta Nomor: 110/KU0000/II/2023/0007, tanggal 8

Halaman 95 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Februari 2023.

7. 30 (tigapuluh) halaman fotocopy Studi Kelayakan Kegiatan untuk CAPEX untuk Perusahaan INBRENG (Sinergy BUMD/BUMD) 2015.
8. 1 (satu) bundle Fotocopy Review rencana penguranga modal pemerintah pada PT. JAKPRO , tanggal 12 Nov 2015.
9. 1 (satu) bundle Fotocopy Studi Kelayakan Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT Jakpro kepada Kepala BPKAD Prov. DKI Jakarta Nomor: 075/UT2000/110/XI/2015. 24 Nov 2015.
10. 1 (satu) bundle Fotocopy Penyampaian Studi Kalayakan PMP melalui PBD-DKI Jakarta kepada PT Jakpro, kepada Kepala BPKAD Pemprov DKI Jakarta Nomor: 008/UT2000/110/XI/2015, 5 Nov 2015.
11. 2 (dua) lembar Fotocopy laporan monitoring pelaksanaan proyek atau kegiatan atas penggunaan dana PMD kepada BUMD dan PT PATUANG Pemprov DKI Jakarta per Desember 2022.
12. 3 (tiga) lembar Fotocopy daftar dokumen 12 kegiatan PMD Pemprov tahun 2015.
13. 5 (lima) lembar Fotocopy Dokumen detail serapan Investasi pada proyek properti, Infrastruktur, Utilitas dari 2013 s/d 2022.
14. 4 (empat) lembar Fotocopy rencana penggunaan dana Realokasi PT. JAKPRO tahun 2015.
15. 8 (delapan) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 5.006.221.574,30.
16. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 5.006.429.793.48.
17. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 87.559.263.919.60.

Halaman 96 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>18. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 54.528.443.524.29.</p> <p>19. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 5.535.869.011.76.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 5.583.012.907.92.</p> <p>21. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 3.001.795.699.76.</p> <p>22. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 3.251.638.160.96.</p> <p>23. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 7.101.992.440.83.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 7.070.915.116.67.</p> <p>25. 9 (sembilan) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 2.122.745.622.71.</p> <p>26. 7 (tujuh) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 2.649.877.906.96.</p> <p>27. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance: 8.035.804.956.95.</p> <p>28. 2 (dua) lembar Fotocopy rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 8.957.854.725.37.</p> <p>29. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mega periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018, Opening Balance:</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 97 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 159.205.607.88.

30. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank Mega periode 1 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018, Opening Balance: 165.561.247.18.
31. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808165752 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
32. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808165752 periode 1 Agustus-31 Agustus 2018.
33. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808170004 periode 1 Agustus-31 Agustus 2018.
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808170004 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
35. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808006126 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
36. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank DKI No Rek: 10808006126 periode 1 Agustus-31 Agustus 2018.
37. 1(satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 30202000011 periode 1 Juli-31 Juli 2018.
38. 1(satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank DKI No Rek: 30202000011 periode 1 Agustus - 31 Agustus 2018.
39. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BCA No Rek: 581-5000789 periode 30 Juni - 31 Juli 2018.
40. 1(satu) lembar Fotocopy Rekening koran Bank BCA No Rek: 581-5000789 periode 30 Juli - 31 Agustus 2018.
41. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening koran Bank BCA No Rek: 686-093399 periode 30 Juni - 31 Juli 2018.
42. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening koran Bank BCA No Rek: 686-093399 periode 30 Juli -31 Agustus 2018.
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0191635599 Periode tanggal 01-07-2018 s/d 31-07-2018.
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0191635599 Periode tanggal 01-05-2013 s/d 31-07-2018.
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0198277523 Periode tanggal 14-05-2013 s/d 06-09-2018.
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank BJB No rek

Halaman 98 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0022181769001 periode 1 Juli – 31 Juli 2018.

47. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank BJB No rek 0022181769001 ; periode 1 Agustus – 31 Agustus 2018.
48. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BJB No rek 0056537074001 ; periode 1 Juli – 31 Juli 2018.
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank BJB No rek 0056537074001 ; periode 1 Agustus – 31 Agustus 2018.
50. 1(satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank OCBS NISP No rek 624010099999 periode 1 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018.
51. 1(satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank OCBS NISP No rek 624010099999 periode 1 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018.
52. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 30 Juni 2018 Nomor : 037/UT2000/110/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.
53. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) Triwulan IV 2019 Nomor : 081/UT0000/110/VII/2018 tanggal 24 Januari 2020.
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Momitoring Pelaksanaan tugas Proyek/Kegiatan atas penggunaan dana penyertaan modal Daerah (PMD) tahun 2006 s/d 2016 Kepada PT. JAKPRO per 30 April 2017, Mei 2017.
55. 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Monitoring Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) Nomor : 071/UT2000/110/IV/2016, taggal 29 April 2016.
56. 4 (empat) lembar Fotocopy Laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Juli 2017 Nomor: 031/UT2000/110/VII/2017, taggal 16 Agustus 2017.
57. 1 (satu) bundle Fotocopy Tanggapan atas surat Bareskrim Polri Nomor: 110/KU0000/IV/2023, taggal 19 April 2023.
58. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU1000-JI-1512-00011, tanggal 15-12-2015.

Halaman 99 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor: 004/DK-JP/Pst/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
60. 2 (dua) lembar Fotocopy surat Reprerentasi atas studi kelayaka penyertaan modal daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2916 pada PT. JAKPRO Nomor : 012/UT2000/110/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015.
61. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27-04-17.
62. 1 (satu) bundle Fotocopy bukti Journal pembayaran Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28-07-2017.
63. 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Pinjaman Nomor Jakpro: 005/UT2000/107/IV/2017 dan Nomor: 003/PT. JIP/P/IV/2017 PT. JIP, tanggal 25 April 2017.
64. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Nomor: 002/UT2000/111/VI PT. JAKPRO Nomor: 002/UT2000/V111/VII/2018, tanggal 10 September 2018.
65. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Nomor: 001/UT2000/111/VII/2016 PT. JAKPRO, tanggal 28 Juli 2016.
66. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO (Penseroda) Nomor : 152/UT0000/111/II/2020 PT. JAKPRO, tanggal 20 Februari 2016.
67. 3 (tiga) lembar Fotocopy Review Surat Permohonan Pinjaman Pemegang Saham Nomor : 185/JIP/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Nomor : 071/JIP/II/2017, tanggal 16 Februari 2017.
69. 1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Direksi PT. JAKPRO Perubahan Struktur Organisasi PT. JAKPRO Nomor : 002/UT2000/111/IV/2018, tanggal 25 April 2015.
70. 1 (satu) bundle Fotocopy AKTA Notaris berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT. JAKPRO Nomor : =1= tanggal 4 Juni 2008.
71. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusa Direksi PT. JAKPRO Nomor : 003/UT2000/111/XI/2018, tanggal 19 November

Halaman 100 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank DKI Cab. Balaikota 1DR-08-16575-2, tanggal 31 Desember 2015.
73. 1 (satu) Bundle Fotocopy Studi Kelayakan Kegiatan Capek untuk Perusahaan Inbreng (Sinergy BUMD/BUMN), tahun 2015.
74. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Jurnal Penerimaan Nomor : JI-1809-00128, tanggal 17-09-2018.
75. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Jurnal Penerimaan Nomor : JI-1811-00090, tanggal 13-11-2018.
76. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU2000-JI-1612-00047, tanggal 30 Desember 2016.
77. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU1000-JI-1512-00016, tanggal 23 Desember 2015.
78. 1 (satu) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Ringkasan Penerimaan Dana PMD PT. JAKPRO s/d Juni 2021 Nomor : 110/UT/0000/VIII/2021/0280, tanggal 12 Agustus 2021.
79. 3 (tiga) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan I Nomor : 021/UT/0000/110/V/2020, tanggal 14 Mei 2020.
80. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan IV Nomor : 081/UT/0000/110/II/2020, tanggal 24 Januari 2020.
81. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan III Nomor : 048/UT/0000/110/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019.
82. 3 (tiga) lembar Fotocopy Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan PMD Triwulan II Nomor : 075/UT/0000/110/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019.
83. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Maret 2019 Nomor :

Halaman 101 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/UT/2000/110/IV/2019, tanggal 18 April 2019.

84. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Desember 2018 Nomor : 064/UT/2000/110/II/2019, tanggal 28 Januari 2019.
85. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian laporan Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 30 Juni 2018 Nomor : 064/UT/2000/110/VII/2019, tanggal 17 Juni 2019.
86. 1 (satu) bundle Fotocopy AKTA Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO Nomor : 3, tanggal 8 Mei 2017.
87. 1 (satu) bundle Fotocopy AKTA Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO Nomor : 04, tanggal 20 Juni 2016.
88. 4 (empat) lembar Fotocopy Permohonan Pencairan Pemenuhan PMP sebesar Rp.1.500.000.000.000,- dari APBD-P tahun 2015 Nomor : 027/UT2000/110/XI/2015, tanggal 12 November 2015.
89. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Nomor : KU1000-JI-1512-00011, tanggal 15-12-2015.
90. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank DKI 108-08-16575-2 periode 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015, tanggal 31 Desember 2015.
91. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28-07-2017.
92. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27-04-2017.
93. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU2000-JO-1603-00087, tanggal 17-03-2016.
94. 6 (enam) lembar Fotocopy data rekafitulasi pinjaman yang diberikan PT. JAKPRO kepada PT. JIP periode 31 Desember 2014 s/d 2018.
95. 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU1000-JO-1510-00005, tanggal 02-10-2015.

Halaman 102 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta pernyataan keputusan pemegang Saham diluar rapat PT. JIP No. 5, tanggal 16 April 2018.
97. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Nomor: KU2000-BK-1508-00109, tanggal 24-04-2017.
98. 1(satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro No. BJ 716380, tanggal 24 Agustus 2015.
99. 1(satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 135/JIP/Srt/VII/2015, perihal Proyeksi Proyek (Laba rugi dan Arus Kas, tanggal 18 Agustus 2015.
- 100.1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor : KU2000-VC-1508-00002, tanggal 24 Agustus 2015.
101. 1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Dana talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor: KU2000-1508-00002, tanggal 20 Agustus 2015.
- 102.1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK PT. JIP Nomor : 5/KU2000-103/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015.
103. 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK Nomor : 135/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015.
104. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 002/DEKOM-JIP/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015.
105. 2 (dua) lembar Fotocopy Risala Rapat Dewan Direksi PT. JAKPRO, tanggal 06 Agustus 2015.
106. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Dana Talangan Proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU1000-JV-1508-00123, tanggal 21 Agustus 2015.
107. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi permohonan persetujuan Dewan Komisaris untuk penambahan setoran modal dan pengajuan fasilitas pembiayaan ke Bank Nomor : 124/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015.
108. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan persetujuan Dewan

Halaman 103 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris untuk penambahan setoran modal dan pengajuan fasilitas pembiayaan ke Bank Nomor: 124/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015.

109. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 002/DEKOM-JIP/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015.

110. 4 (empat) lembar Fotocopy Risala Rapat Dewan Direksi PT. JAKPRO permohonan pemberian modal kerja proyek TIK. PT. JIP, tanggal 06 Agustus 2015.

111. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Rencana Proyek TIK di Kuartal Ketiga tahun 2015 dan Kebutuhan Modal Kerajaan.

112. 1 (satu) bundle Fotocopy Perjanjian Pekerjaan antara PT. TGM dengan PT. JIP No: 0001/PPJ-SACME /TGM-XYZ/XX-2015, tanggal 14 Agustus 2015.

113. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-058-00016-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

114. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-059-00015-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

115. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-060-00009-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

116. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-061-00009-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

117. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-062-00017-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

118. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-063-00021-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

119. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-064-00024-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

120. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-065-00022-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

121. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-066-00023-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

122. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No : TGM-067-00007-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

123. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :

Halaman 104 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGM-068-00018-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

124. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-069-00001-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

125. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-70-00014-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

126. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-71-00005-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

127. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-72-00004-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

128. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-73-00019-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

129. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-074-00012-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

130. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-075-00013-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

131. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-076-00008-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

132. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-078-00003-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

133. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) No :
TGM-078-00003-0301-0815, tanggal 5 Agustus 2015.

134. 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran daftar nilai
Telecommunication Infrastructure.

135. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman
Sementara untuk Proyek TIK Nomor : ... /JIP/Srt/IX/2015,
tanggal 30 September 2015.

136. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat pemberitahuan
persetujuan Kredit (SPPK) An. PT. JIP Nomor :
1706/GKK/IX/2015.-

137. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi surat masuk
permohonan pinjaman sementara untuk proyek TIK
Nomor : 126/JIP/Srt/IX/2015, tanggal 3 September 2015.

138. 1 (satu) lembar Fotocopy Internal Memo Dana Talangan
PT. JIP U/Proyek PT.TIK Nomor : KU2000-1510-00001,
tanggal 08 Oktober 2015.

Halaman 105 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Dana Talangan PT. JIP U/Proyek PT. TIK Nomor : KU1000/-JV-1510-00046, tanggal 08 Oktober 2015.
140. 2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 011/DK-JP/Pst/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015.
141. 1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan PT. JIP U/Proyek PT. TIK Nomor : KU2000-VC-1510-00001, tanggal 08 Oktober 2015.
142. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank DKI No. BJ 716398, tanggal 20-10-2015.
143. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Nomor : KU2000-BK-1510-00102, tanggal 20-10-2015.
144. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Nomor : KU1000-JO-1510-00115, tanggal 30 Oktober 2015.
145. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-JO-1603-00087, tanggal 17 Maret 2016.
146. 1 (satu) lembar Fotocopy Internal Memo Surat Persetujuan Komisaris tentang pemberian fasilitas pinjaman modal kerja PT. JIP Nomor : 11/VP/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.
147. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-JO-1603-00087, tanggal 17 Maret 2016.
148. 1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-VC-1603-00003, tanggal 15 Maret 2016.
149. 1 (satu) lembar Fotocopy Internal Memo Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP berdasarkan Memo -01/KU2000/103/III/2016 Nomor : KU2000-VC-1603-00003, tanggal 15 Maret 2016.

Halaman 106 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : ... , tanggal ...,
151. 2 (dua) lembar Fotocopy Memo Permohonan Persetujuan Pinjaman Sementara PT. JIP untuk Proyek TIK Nomor : 01/KU2000/103/III/2016, tanggal 10 Maret 2016.
152. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat Permohonan Pinjaman Sementara untuk Proyek TIK Nomor : 071/JIP/Srt/II/2016, tanggal 29 Februari 2016.
153. 10 (Sepuluh) lembar Fotocopy Rencana Proyek PT. JIP tahun 2016.
154. 1 (satu) lembar Fotocopy Kontarak Kerjasama PT. DAYA MITARA TELEKOMUNIKASI dan PT. JAKPRO (PT. JIP).
155. 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. DAYA MITARA TELEKOMUNIKASI dengan PT. JIP Nomor : DTM.0331/PM2/DKA-a1000000/VI/2016, tanggal 12 Januari 2016.
156. 1 (satu) lembar Fotocopy Risala Rapat Penunjukan Mitra Pekerjaan SACME Nomor : (...)/PM2/DMT-DK-120000a1000000/V/2015, tanggal 11 Januari 2016.
157. 2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 011/DK-JP/Pst/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015.
158. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit (SPPK) Nomor : 0263/GKK/II/2016, tanggal 29 Februari 2016.
159. 2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor : KU2000-JV-1603-00063 berdasarkan Memo-01/KU2000/103/III/2016, tanggal 16 Maret 2016.
160. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Uang Muka Investasi ke PT. JIP untuk Preyek TIK Nomor : KU2000-JO-1602-00002, tanggal 1 Februari 2016.
161. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran. Uang Muka Investasi ke PT. JIP untuk Preyek TIK Nomor : KU2000-BK-1602-00002, tanggal 01-02-2016.
162. 1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Uang Muka

Halaman 107 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi ke PT. JIP untuk Preyek TIK Nomor : KU2000-VC-1601-00005, tanggal 26 Januari 2016.

163. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan Persetujuan Anggaran Nomor : KU2000-VC-1601-00005, tanggal 16 Januari 2016.

164. 2 (dua) lembar Fotocopy Memo Permohonan Persetujuan Pinjaman Sementara yang akan di Konversikan menjadi Ekuitas kepada PT. JIP terkait Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor : 01/KU0000/103/I/2016, tanggal 26 Januari 2016.

165. 1(satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 025/JIP/Srt/I/2016, permohonan pinjaman sementara untuk proyek TIK, tanggal 21 Januari 2016.

166. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman sementara untuk proyek TIK Nomor : 025/JIP/Srt/I/2016, tanggal 21 Januari 2016.

167. 2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 001/DEKOM-JP/I/2016, tanggal 13 Januari 2016.

168. 9 (sembilan) lembar Fotocopy Rencana Proyek PT. JIP di Kuartal Pertama Tahun 2016.

169. 2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher Uang Muka Inverstasi Ke PT. JIP untuk proyek TIK Nomor : KU2000-JV-1601-00086, tanggal 27 Januari 2016.

170. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27 April 2017.

171. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran. Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-BK-1704-00115, tanggal 27 April 2017.

172. 1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Pengeluaran. Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-VC-1704-00001, tanggal 05 April 2017.

Halaman 108 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 9 (satu) lembar Fotocopy Internal Memo Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU6000-1704-00001, tanggal 05 April 2017.
174. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Permohonan persetujuan pembelian pinjaman pemegang saham Tahun 2017 serta pencairannya kepada PT. JIP untuk proyek Teknologi Komunikasi dan Informatika Nomor : 004/KU4000/103/III/2017, tanggal 27 Maret 2017.
175. 1 (satu) bundle Fotocopy Permohonan Persetujuan Pinjaman Subordinasi Proyek Micro/Macro Cell, Subducting, GPON, tanggal 8 Maret 2017.
176. 4 (empat) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 055/JIP/III/2017, permohonan pinjaman pemegang saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi tahun 2017, tanggal 30 Maret 2017.
177. 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor: 085/JIP/VI/2017, Riview Surat permohonan pinjaman pemegang saham tahun 2017, tanggal 04 April 2017.
178. 3 (tiga) lembar Fotocopy Indikasi Penawaran Fasilitas Kredit Nomor : 0443/GKK/III/2017, , tanggal 31 Maret 2017.
179. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat masuk Nomor : 517/JIP/XII/2016, permohonan pinjaman pemegang saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi awal tahun 2017, tanggal 13 Desember 2016.
180. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman pemegang saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi awal tahun 2017 Nomor : 517/JIP/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.
181. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanggapan Dewan Komisaris atas rencana pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP Nomor : 006/DK-JP/Pst/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
182. 2 (dua) lembar Fotocopy Tanggapan Permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham pada

Halaman 109 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 037/UT2000/110/III/2017 tanggal 15

Maret 2017.

183. 5 (lima) lembar Fotocopy permohonan tanggapan pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi komunikasi untuk tahun Anggaran 2017 Nomor : 004.01/DK-JP/Srt/II/2017, tanggal 28 Februari 2017.

184. 5 (lima) lembar Fotocopy Risala Rapat Pembahasan RKAP PT. JAKPRO Tahun 2017, tanggal 17 Januari 2016.

185. 4 (empat) lembar Fotocopy bukti Journal Voucher. Piutang Afiliasi tahap 1 untuk proyek teknologi informasi dan teknologi PT. JIP Nomor : KU2000-JV-1704-00111, tanggal 05-04-2017.

186. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28 Juli 2017.

187. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : KU2000-BK-1707-00075 tanggal 28 Juli 2017.

188. 1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : KU6000-VC-1707-00001, tanggal 4 Juli 2017.

189. 1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Permohonan pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek teknologi dan telekomunikasi tahap II tahun 2017 Nomor : /KU6000-1707-00001, tanggal 17 Juli 2017.

190. 3 (tiga) lembar Fotocopy Meno permohonan pencairan pinjaman pemegang saham tahap II kepada PT. JIP untuk proyek Teknologi dan Informatika Nomor : 012/KU4000/103/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017.

191. 6 (enam) lembar Fotocopy perjanjian pinjaman Nomor Jakpro: 565/UT2000/107/IV/2017 Nomor JIP:

Halaman 110 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
009/JIP/P/IV/2017, tanggal 25 April 2017.

192. 5 (lima) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher pinjaman pemegang saham tahap II kepada PT. JIP untuk proyek Teknologi dan Informatika Nomor : KU1000-JV-1508-00123, tanggal 21 Agustus 2015.
193. 7 (tujuh) lembar Fotocopy perjanjian pinjaman Nomor Jakpro : 001/UT2000/107/IV/2018 Nomor JIP : 002/JIP/P/IV/2018, tanggal 03-04 2018.
194. 2 (dua) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran JV-1804-00002 pinjaan sementara ke PT. JIP sebesar Rp. 100 Miliar Nomor : JO-1804-00008, tanggal 04-04-2018.
195. 6 (enam) lembar Fotocopy Memo permohonan persetujuan pemberian pinjaman sementara kepada PT. JIP sebesar Rp. 100 Miliar untuk kebutuhan dana pelunasan kredit modal kerja kepada Bank DKI Nomor : 013/KU6000/103/III/2018, tanggal 27 Maret 2018.
196. 3 (tiga) lembar Fotocopy permohonan pinjaman untuk pelunasan KMK Bank DKI Nomor : 198/JIP/Srt/III/2018, tanggal 26 Maret 2018.
197. 7 (tujuh) lembar Fotocopy surat persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor : 0026.GKK/II/2018.
198. 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor : 67, tanggal 29 Nopember 2016.
199. 4 (empat) lembar Fotocopy pelaporan atas rencana pemberian pinjaman sementara kepada PT. JIP Nomor : 001/UT2000/110/IV/2018, tanggal 4 April 2018.
200. 1 (satu) bundle Fotocopy Perjanjian Pinjaman Nomor JAKPRO : 001/UT2000/107/VIII/2018, Nomor JIP : 004/JIP/P/VIII/2018, tanggal 02-08-2018.
201. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ke PT. JIP Nomor : 392/JIP/IX/2016, tanggal 30 September 2016.
202. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 374/JIP/IX/2016, tanggal 08 September 2016.
203. 1 (satu) bundle AKTA Notaris Perjanjia Kredit Nomor : 67,

Halaman 111 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2016.

204. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan surat pernyataan penjamin Bilyet Deposito Nomor : 441/JIP/XI/2016, tanggal 16 November 2016.
205. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 440/JIP/SP/XI/2016, tanggal 3 November 2016.
206. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan persetujuan komisaris untuk fasilitas pembiayaan perbankan Nomor : 438/JIP/XI/2016, tanggal 2 November 2016.
207. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 1195/GKK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016.
208. 2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 004/DK-JP/Pst/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
209. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pemegang Saham PT. JIP Nomor : 445/JIP/XI/2016 tanggal 4 November 2016.
210. 2 (dua) lembar Fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 004/DK-JP/Pst/X/2016 tanggal ... Oktober 2016.
211. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Serkuer Para Pemegang Saham PT. JIP, tanggal 11 November 2016.
212. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 1114/GKK/IX/2016, tanggal 23 September 2016.
213. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan Pengembalian pokok dana talangan dari PT. JIP untuk keperluan proyek TIK-IM Nomor : 095/UT2000/110/XI/2015, tanggal 23 Desember 2015.
214. 2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Penerimaan Nomor : KU2000-BM-1512-00003, tanggal 15 Desember 2015.
215. 2 (dua) lembar Fotocopy Tagihan Dana Talangan PT. JIP atas Pembayaran Proyek TIK Nomor: 095/UT2000/110/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015.
216. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran Dana

Halaman 112 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU1000-JO-1508-00131, tanggal 26 Agustus 2015.

217. 3 (tiga) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-BK-1508-00109, tanggal 24 Agustus 2015.

218. 2 (dua) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana Talangan Proyek TIK PT. JIP Nomor : KU2000-VC-1508-00002, tanggal 20 Agustus 2015.

219. 4 (empat) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan pengembalian dana talangan proyek TIK-PT. JIP berdasarkan Memo-01/KU1000/103/III/2016 Nomor : KU1000-JI-1612-00047, tanggal 30 Desember 2016.

220. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank pengembalian dana talangan proyek TIK-PT. JIP berdasarkan Memo-01/KU1000/103/III/2016 Nomor : KU1000-BM-1612-00015, tanggal 13 Desember 2016.

221. 8 (delapan) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Desember 2016 s.d 26 Desember 2016 Account No. 103000199155.

222. 4 (empat) lembar Fotocopy surat permohonan setoran modal kepada dirut PT. JAKPRO Nomor : 039/JIP/DIR/II/2018, tanggal 19 Januari 2018.

223. 1 (satu) bundle Fotocopy surat permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP sebesar terkait rencana proyek GPON Rp. 118.341.000.000,- Nomor : 113/OP2000/103/V/2018, 17 Mei 2018.

224. 1 (satu) bundle Fotocopy permohonan persetujuan pemberian pinjaman sementara kepada PT. JIP Rp. 100 Miliar untuk kebutuha dana pelunasa kredik modal kerja (KMK) kepada Bank DKI Nomor : 013/KU6000/103/III/2018, tanggal 27 Maret 2018.

225. 3 (tiga) lembar Fotocopy surat keputusan para pemegang Saham (KPPS) yang berkekuatan sama dengan RUPS PT. JIP, tanggal 21 Desember 2015.

Halaman 113 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) bundle Fotocopy Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja- Kredit Agunan Tunai/ Cash Collateral Nomor : 06, tanggal 06-11-2015.
227. 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris antara PT. JIP dengan Bank DKI. Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja- Kredit Agunan Tunai/Cash Collateral Nomor : 06, tanggal 06-11-2015.
228. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan pencairan DPO170001 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 078644 November 2018 Nomor : JI-1811-00090, tanggal 13 November 2018.
229. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Penerimaan pencairan DPO170001 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 078644 Nomor : BM-181100090, tanggal 13 November 2018.
230. 2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran pencairan DPO170001 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 078644 Nomor : JO-1811-00411, tanggal 13 November 2018.
231. 3 (tiga) lembar Fotocopy Pencairan Deposito Nomor : 029/UT2000/110/XII/2018, tanggal 12 Nopember 2018.
232. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Penerimaan pencairan DPO170004 Bank DKI Cab. Balai Kota -AXXXVIII 013969 (Breakable) 17/9/2018 Nomor : JI-1809-00128, tanggal 17 September 2018.
233. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Penerimaan pencairan DPO170004 Bank DKI Cab. Balai Kota – AXXXVIII 0139 Nomor : BM-180900119, tanggal 17 September 2018.
234. 3 (tiga) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran DPO170004 Bank DKI Cab. Balai Kota –AXXXVIII 013969 Nomor: JO-1809-00436, tanggal 29 September 2018.
235. 3 (tiga) lembar Fotocopy Pencairan Deposito Nomor : 024/UT2000/110/IX/2018, tanggal 14 September 2018.
236. 1 (satu) bundle Fotocopy Permohonan Bantuan Pinjaman

Halaman 114 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja Proyek Menara Telekomunikasi IBS Nomor :

336/JIP/Srt/VIII/2016, tanggal 09 Agustus 2016.

237.2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan pinjaman pemegang Saham dan Rencana pinjaman perbankan untuk Investasi awal tahun 2017 Nomor : 517/JIP/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.

238.1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Surat Permohonan pinjaman pemegang Saham dan Rencana pinjaman perbankan untuk Investasi awal tahun 2017 Nomor : 517/JIP/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.

239.5 (lima) lembar Fotocopy Risalah Rapat Pembahasan RKAP PT. JAKPRO tahun 2017, tanggal 17 Januari 2017.

240.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Nomor : 071/JIP/II/2017, tanggal 16 Februari 2016.

241.5 (lima) lembar Fotocopy Permohonan tanggapan atas pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT. JIP untuk proyek telekomunikasi untuk tahun anggaran 2017 Nomor : 004.01/DK-JP/Srt/II/2017, tanggal 22 Februari 2017.

242.1 (satu) lembar Fotocopy Tanggapan Dewan Komisaris Permohonan rencana pemberian pinjaman pemegang saham pada PT. JIP Nomor : 037/UT2000/110/III/2017, tanggal 15 Maret 2017.

243.1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham pada PT. JIP Nomor : 006/DK-JP/Srt/III/2017, tanggal 22 Maret 2017.

244.1 (satu) lembar Fotocopy Dukungan atas aksi Korporasi terkait pinjaman Subordinasi Nomor : 003/DEKOM-JIP/III/2017, tanggal 27 Maret 2017.

245.6 (enam) lembar Fotocopy Memo permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemegang saham tahun 2017 serta pencairannya kepada PT. JIP untuk proyek teknologi komunikasi dan Informatika Nomor : 004/KU4000/103/III/2017, tanggal 27 Maret 2017.

246.1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pinjaman

Halaman 115 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi tahun 2017 Nomor : 155/JIP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017.

247. 1 (satu) lembar Fotocopy Jadwal Penarikan Pinjaman Subordinasi Pemegang Saham, tanggal 30 Maret 2017.

248. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi permohonan pinjaman pemegang Saham dan rencana pinjaman perbankan untuk investasi tahun 2017 Nomor : 155/JIP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017.

249. 1 (satu) lembar Fotocopy Review surat permohonan pinjaman pemegang Saham Nomor : 185/JIP/IV/2017, tanggal 04 April 2017.

250. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Review surat permohonan pinjaman pemegang Saham Nomor : 185/JIP/IV/2017, tanggal 30 Maret 2017.

251. 3 (tiga) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Piutang Afiliasi Nomor : KU6000-VC-1704-00001, tanggal 05 April 2017.

252. 1 (satu) lembar Fotocopy perjanjian pinjaman PT. JIP No Jakpro : 005/UT2000/107/IV/2017 dan No JIP 003/JIP/P/IV/2017 25 April 2017.

253. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyer Giro Nomor : CL093465, tanggal 27 April 2017.

254. 2 (dua) lembar Fotocopy bukti Journal Pembayaran Piutang Afiliasi Nomor : KU2000-JO-1704-00118, tanggal 27 April 2017.

255. 5 (lima) lembar Fotocopy permohonan pencairan tahap II Nomor : 318/JIP/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017.

256. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pencairan Nomor : KU4000/103/VII/2017, tanggal ... Juli 2017.

257. 1 (satu) lembar Fotocopy internal memo Nomor : KU6000-1704-00001, tanggal 14 Juli 2017.

258. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Voucher pinjaman pemegang Saham kepada PT. JIP untuk Proyek Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Tahap II 2017 Nomor :

Halaman 116 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KU2000-JV-1715-0051, tanggal 18 Juli 2017.

259. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Journal Pembayaran pinjaman pemegang Saham kepada PT. JIP untuk Proyek Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Tahap II 2017 Nomor : KU2000-JO-1707-00086, tanggal 28 Juli 2017.
260. 2 (dua) lembar Fotocopy Bukti Kas/Bank Pengeluaran pinjaman pemegang Saham kepada PT. JIP untuk Proyek Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Tahap II 2017 Nomor : BK-1718-00075 tanggal 28 Juli 2017.
261. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan perpanjangan pinjaman Nomor : 273/JIP/Srt/IV/2018, tanggal 18 April 2018.
262. 8 (delapan) lembar Fotocopy Permohonan persetujuan Addendum perjanjian pinjaman antara PT. JIP atas pinjaman proyek Teknologi Komunikasi dan Informatika (GPON Tower Telco dan Subdukting) serta pelaporan progress Teknologi Komunikasi dan Informatika Nomor : 025/KU6000/103/V/2018, tanggal 21 Maret 2018.
263. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (PKS) No : TGM-075-00013-0301-0815, tanggal 05 Agustus 2015.
264. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Proyeksi Proyek (Laba Rugi dan Arus Kas) Copy persetujuan Dekom JIP, Risala Rapat Direksi Jakpro, Kontarak Payung Pembangunan 200 Site antara Triview-JIP dan 24 SPK dari Triview Nomor : 135/JIP/Srt/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015.
265. 1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK PT. JIP Nomor : 5/KU2000/103VIII/3015, tanggal 20 Agustus 2015.
266. 1 (satu) lembar Fotocopy Internal Meno Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor: /KU2000-1508-00002, tanggal 20 Agustus 2015.
267. 1 (satu) lembar Fotocopy Advis Pembayaran Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-VC-0002, tanggal 20 Agustus 2015.

Halaman 117 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>268. 1 (satu) lembar Fotocopy Journal Dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-JO-00131, tanggal 26 Agustus 2015.</p> <p>269. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti KAS/BANK PENGELUARAN dana talangan proyek TIK-PT. JIP Nomor : KU2000-BK-1508-00109, tanggal 24 Agustus 2015.</p> <p>270. 2 (dua) lembar Fotocopy Penyampaian Penggunaan Dana PMP Nomor : 029/UT2000/110/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.</p> <p>271. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Realokasi Penggunaan PMP Nomor: UT2000/110/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015.</p> <p>272. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Rapat Pemegang Saham di luar rapat PT. JAKPRO, tanggal April 2015.</p> <p>273. 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris berita acara rapat umum pemegang Saham, tanggal 20 Januari 2015.</p> <p>274. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Simulasi pendanaan untuk proyek penugasan, tanggal November 2015.</p> <p>275. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Realokasi dana PMP akusisi PT. PALYJA, tanggal 9 November 2015.</p> <p>276. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Penyertan modal pemerintah DKI Jakarta tahun 2016 di PT. JAKPRO (Rapat terbatas DPRD DKI Jakarta, tanggal 10 November 2015.</p> <p>277. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Giro Nomor : 0191635599 Periode tanggal 01-08-2018 s/d 31-08-2018.</p> <p>278. 1 (satu) bundle Fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 PT. JAKPRO dan entitas anak Nomor: 003/KU0000/121/IX/2019.</p> <p>279. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2698 tahun 2015, tanggal 8 Desember 2015 tentang pemcairan PMD pada PT.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 118 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JAKPRO tahun Anggaran 2015.

280. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2241 tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang pemangkatan Ir. NUR ALI NUGROHO, MAPPI (Cert) sebagai penasehat penasehat Invertasi Daerah.

281. 1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 644 tahun 2015, tanggal 23 April 2015 tentang Penjabat diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar tahun anggaran 2015.

282. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2080 tahun 2014, tanggal 2 Desember 2014 tentang penunjukan kuasa bendahara umum Daerah tahun anggaran 2015.

283. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 73 tahun 2015, tanggal 20 Januari 2015 tentang perubahan atas Kepgub Nomor : 2080 tahun 2014 tentang penunjukan kuasa bendahara umum Daerah tahun anggaran 2015.

284. 1 (satu) bundle Fotocopy surat Nomor : 05/NA/PI-DKI/REKOM-JAKPRO/XI/2015, tanggal 16 November 2015 perihal Rekomendasi PMD Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 pada PT. JAKPRO.

285. 2 (dua) lembar Fotocopy surat rincian dokumen pelaksanaan perubagan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah Nomor DPA-SKPD 1.20.380.380.00.000.6.2, tanggal 30 Oktober 2015.

286. 2 (dua) lembar Fotocopy surat rincian dokumen pelaksanaan perubagan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah Nomor DPA-SKPD 1.20.380.380.00.000.6.2, tanggal 30 Oktober 2015 1 (satu) lembar Fotocopy rekening Koran Bank DKI periode tanggal 15 Desember 2015 s/d 15 Desember 2015 No. AC : 139-02-01605-4, tanggal 20 Maret 2023.

Disita dari Maryanti tanggal 03 Agustus 2023

Halaman 119 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Studi Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) – DKI Jakarta Kepada PT. Jakarta Propertindo Bulan Oktober 2015.
Disita dari Ir. Abdul Hadi H.S, MM tanggal 31 Agustus 2023	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Kartu tanda Penduduk Atas Nama Abdul Hadi H.S, NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3174071306570003, Kewarganegaraan : Indonesia. 2. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Akta Notaris Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.KN. SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00176.AH.02.01.Tahun 2015 Tanggal 16 Maret 2015, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta Infrastruktur Mandiri, Nomor: 06, tanggal 10 Desember 2015. 3. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Akta Notaris, Nomor: 28, tanggal 20 Januari 2015 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.101.AH.02.02-Tahun 2011, tanggal 8 November 2011, Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Nomor: 561/BL/STTD-N/2012, tanggal 25 Januari 2012, terkait Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Jakarta Propertindo. 4. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Akta Notaris, Nomor: 102, tanggal 30 Mei 2016 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.101.AH.02.02-Tahun 2011, tanggal 8 November 2011, Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Nomor: 561/BL/STTD-N/2012, tanggal 25 Januari 2012, terkait Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jakarta Propertindo.
Disita dari Aji Rizki Yodhana, S.H., M.H. tanggal 14 September 2023	

Halaman 120 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	<p>1 (satu) bundle fotocopy dokumen Akta Notaris, Nomor: 13, tanggal 29 Juli 2015 dari Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H, SK MENKEH & HAM RI Tgl 26 Februari 2002 Nomor : C-131 HT 03.02 Tahun 2002 SK KEPALA BPN, Tanggal 29 Oktober 2002 No: 16-X-2002, Terkait Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo.</p>
<p>Disita dari Euis Sumiati, S.E. tanggal 19 Oktober 2023</p>	
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BAST PKS No.0364. 2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BAST PKS No.086. 3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir BAST PKS No.278. 4. 1 (satu) bundle fotocopy PKS ONE TIME VENDOR (OTV) PEKERJAAN SACME MACROCELL DMT.0364/PM2/DKAA 1000000/XII/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO. 5. 1 (satu) bundle fotocopy PKS ONE TIME VENDOR (OTV) PEKERJAAN MACROCELL DMT.086/PM2/DKAA1000000/III/2017 TANGGAL 3 APRIL 2017 PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO. 6. 1 (satu) bundle fotocopy PKS ONE TIME VENDOR (OTV) PEKERJAAN MACROCELL, CORE DMT.278/PM2/DKAA1000000/X/2017 TANGGAL 11 OKTOBER 2017 PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO. 7. 1 (satu) bundle Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor 06 Tanggal 10 Desember 2015. 8. 1 (satu) bundle Fotocopy Akte Pendirian PT. Jakrta Propertindo dan Perubahannya. 9. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor : 025/JIP/SRT//2016 Tanggal 21 Januari 2016 Perihal Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen. 10. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 071/JIP/SRT/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Perihal

Halaman 121 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Proyek TIK

Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen.

11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 190/JIP/SRT/IX/2016 Tanggal 30 September 2015 Perihal Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen copy risalah rapat dewan Direksi PT Jakarta Propertindo, Rekapitulasi SPK yang sudah diterima dari PT Triview Geospasial Mandiri, SPPK dari Bank DKI.

12.1 (satu) bundle fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 135/JIP/SRT/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen copy Persetujuan Dewan Komisaris PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, risalah rapat dewan Direksi PT Jakarta Propertindo, Copy Kontrak Pyung Pembangunan 200 site antara Triview – JIP, Copy 24 SPK dari Triview.

13.1 (satu) bundle Fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 124/JIP/SRT/VIII/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 Perihal Permohonan Pesetujuan Dewan Komisaris Untuk Penambahan Setoran Modal dan Pengajuan Fasilitas Pembiayaan Ke Bank Berserta lembar Disposisi Direktur Keuangan dan Lampiran Dokumen Persetujuan Dewan Komisaris.

14.1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Direksi PT. Jakarta Propertindo Nomor : 009/UT/2000/111/IX/2016 Tanggal 11 November 2016.

15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dirut PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Kepada Dirut PT Jakarta Propertindo Nomor: 336/JIP/VIII/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 Perihal Permohonan Bantuan Pinjaman Modal Kerja Proyek Menara Telekomunikasi IBS berserta Lampiran Paparan Proyek Menara Telekomunikasi IBS.

16.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT.

Halaman 122 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIP Nomor : 008/JIP/Kpts/XI/2015 Tentang pengangkatan

Sdr. CHARISTMAN DESANTO H.S. SE, MSI, AK Sebagai Vice President (VP) Keuangan Dan TIK PT. JIP Pada Tanggal 02 November 2015.

17.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 001/JIP/Kpts/XI/2015 Tentang pengangkatan Sdr. CHARISTMAN DESANTO H.S. SE, MSI, AK Sebagai Vice President (VP) Keuangan Dan TIK PT. JIP Pada Tanggal 02 November 2015.

18.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Asli Surat Nomor : 226/JIP/Srt/X/2015 Prihal : Pemberitahuan Usulan Promosi Karyawan Pada Tanggal 29 Oktober 2015.

19.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 24/JIP/Kpts/XI/2016 Tentang pengangkatan Sdr. ANDRIE SUDARYANTO AK Sebagai CORDINATOR PROJECT PT. JIP Pada Tanggal 26 Oktober 2015.

20.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 03/JIP/Kpts/IV2017 Tentang pengangkatan Sdr. ANDRIE SUDARYANTO AK Sebagai KARYAWAN TETAP PT. JIP Pada Tanggal 26 April 2017.

21.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 016/JIP/Kpts/VIII/2016 Tentang Penetapan Penghasilan Sdr. CHARISTMAN DESANTO H.S. SE, MSI, AK Sebagai Vice President (VP) Keuangan Dan TIK PT. JIP Pada Tanggal 15 Agustus 2016.

22.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 14/JIP/Kpts/VIII/2016 Tentang pengangkatan Sdr. DEFIANA TARIGAN Sebagai Asisten Manager Oprasional Teknologi Informasi dan Komunikasi PT. JIP Pada Tanggal 05 Agustus 2016.

23.2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Asli Keputusan Direksi PT. JIP Nomor : 13/JIP/Kpts/VIII/2016 Tentang Pengangkatan Sdr. RICKY AFRIANTO Sebagai Manager Oprasional Teknologi Informasi dan Komunikasi PT. JIP Pada Tanggal 05 Agustus 2016.

Halaman 123 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.2 (dua) lembar Fotocopy Risalah rapat, Permohonan pemberian modal kerja proyek TIK PT. JIP, pada tanggal 26 Februari 2016.

25.1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Asli Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, pada tanggal 6 Agustus 2019.

26.1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Asli Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, pada tanggal 6 Agustus 2019.

27.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, nomor: 038/UT2000/110/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, beserta Laporan Hasil Audit PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo Tahun 2015 dan Periode 1 Januari s/d 30 April 2016 nomor : LHA-01/UT1000/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 dengan Surat Tugas nomor : 005/UT2000/110/V/2016, tanggal 9 Mei 2016.

28.1 (satu) bundel fotocopyu Surat Direktur PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo dengan nomor: 019/JIP/Srt/I/2016, tanggal 13 Januari 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris untuk penambahan modal disetor dan fasilitas pembiayaan Bank, beserta Surat Persetujuan Dewan Komisaris nomor : 001/DEKOM-JIP/I/2016, tanggal 13 Januari 2016 dengan Papan Rencana Proyek TIK di Kuartal Pertama Tahun 2016.

29.1 (satu) bundel fotocopy dokumen INTERNAL MEMO nomor : 11/VP/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, perihal Surat Persetujuan Komisaris Tentang Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja PT. JIP.

30.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Konsolidasian

Halaman 124 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun-yahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013.

31.1 (satu) bundle fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo tanggal 29 September 2015.

32.1 (satu) bundel fotocopy Materi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Jakrta Infrastruktur Propertindo Tahun Buku 2015.

33.1 (satu) bundel fotocopy AKTA Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO tanggal 20 Juni 2016 nomor 04 dengan notaris LUMASSIA SH.

34.1 (satu) bundel fotocopy AKTA Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAKPRO tanggal 8 Mei 2017 nomor 3 dengan notaris ERNI ROHAINI, SH., MBA.

35.1 (satu) bundel fotocopy Surat Direktur PT. Triview Geospatial Mandiri, tanggal 30 Desember 2015 Perihal Kemajuan Pekerjaan dan Status Penagihan Proyek Pengadaan Menara Telekomunikasi.

36.3 (tiga) lembar fotocopy Lampiran daftar nilai SPK PT. Triview Geospatial Mandiri.

37.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Site Acquisition Site Aquisition dan Civil Mechanical dan Electrical antara PT. Triview Geospatial Mandiri dengan PT. Jakarta Infrastuktur Propertindo nomor : 001/PPJ-SACME/TGM-XYZ/X-2015, tanggal 14 Agustus 2015.

38.2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Dewan Direksi PT. Jakarta Propertindo hari kamis 6 Agustus 2015 dengan Pimpinan Rapat Direktur Utama Abdul Hadi Hs terkait Permohonan Pemberi Modal Kerja Proyek TIK PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo.

39.2 (dua) lembar fotocopy Surat dari PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo dengan nomor surat : 124/JIP/Srt/VIII/2015

Halaman 125 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2015, Perihal permohonan Persetujuan

Dewan komisaris untuk Penambahan Setoran Modal dan Pengajuan Fasilitas Pembiayaan Ke Bank.

40.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Dewan Komisaris dengan nomor : 002/DEKOM-JIP/VIII/2015 tanggal 12 agustus 2015, Perihal Tindak lanjut dari atas Paparan dan Permohonan Surat Direktur Utama PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo.

41.5 (lima) lembar fotocopy Surat PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor surat : 135/JIP/Srt/VIII/2015 tanggal 18 agustus 2015, Perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja Proyek TIK.

42.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Dewan komisais nomor : 001/DEKOM-JIP/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 terkait Tindak Lanjut dari Papran dan Permohonan Surat Direktur PT. Jakrta Infrastruktur Propertindo.

43.1 (satu) bundle fotocopy surat PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI DENGAN PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO: TSM.017/PRASITAC/PM1806114/VI/2018.

44.1 (satu) bundle fotocopy surat PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO DENGAN PT. TOWERINDO PERKASA INTI NO : 007.A/JIP/PKS/IX/2018.

45.3 (tiga) lembar fotocopy surat PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO DENGAN PT.INTAN PRIMA SEJAHTERA NO : 004A/JIP/P/VIII/2017.

46.1 (satu) bundle fotocopy surat PERJANAJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MITRRA MULTI SOLUSI DENGAN PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 0035/M2SJIP00/SACME/04/XI/2015.

47.1 (satu) lembar surat fotocopy PERMOHONAN MENJADI REKANAN KONTRAKTOR MENARA TELEKOMUNIKASI dari PT.JAKARTA INFRASTRUKTIR PROPERTINDO untuk

Halaman 126 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	PT.TELKOMINFRA	SOLUSI	MANDIRI	NO	:
				303/JIP/SRT/XII/2015	tanggal: 17 DESEMBER 2015.
				48.1 (satu)	lembar surat fotocopy PEMBERITAHUAN TERDAFTAR REKANAN KONTRAKTOR MENARA TELKOMUNIKASI dari PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI untuk PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 15.001TSM042016 tanggal : 15 APRIL 2016.
				49.1 (satu)	lembar fotocopy surat PENGAJUAN HARGA SIS/SITAC DAN CME dari PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO untuk PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI, NO : 363/JIP/SRT/VIII/2016 tanggal : 29 AGUSTUS 2016.
				50.1 (satu)	lembar fotocopy surat BERITA ACARA KLARIFIKASI DENGAN NEGOSIASI dari PT.TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI untuk PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO :TSM.101/6/SACME16.
				51.3 (tiga)	lembar surat fotocopy KEPUTUSAN DIREKSI PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 32JIP/KPTS/XII/2016 tentang PEMILIHAN MITRA USAHA KERJASAMA PERSEROAN DALAM RANGKA INVESTASI JANGKA PANJANG.
				52.2 (dua)	lembar surat fotocopy KEPUTUSAN DIREKSI PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO NO : 33JIP/KPTS/XII/2016 tentang PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PT.JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.
				53.6 (enam)	lembar fotocopy KUALIFIKASI/PEMILIHAN KONTRAKTOR PEKERJAAN PENGADAAN & PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI PELAKSANAAN TAHUN 2016.
				54.1 (satu)	bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Site Acquisition Site Aquisition dan Civil Mechanical dan Electrical antara PT. Triview Geospatial Mandiri dengan PT. Jakarta Infr astruktus Propertindo nomor : 001/PPJ-SACME/TGM-XYZ/X

Halaman 127 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Agustus 2015.

	<p>55.1 (satu) bundle fotocopy legalisir DOKUMEN PROJECT LIST PT. TSM (TELKOMINFRA SOLUSI MANDIRI) sebanyak 100 site kepada PT. JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.</p> <p>56.2 (dua) lembar fotocopy Amandemen perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Jasa konstruksi Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME) Microcell Pole (MCP) dan BTS Hotel, Nomor: 0002/TBGTBG00/VEMSACMEMCP/04/VIII/2017.</p> <p>57.2 (dua) lembar fotocopy SURAT KESEPAKATAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJASAMA KONSTRUKSI DAN/ATAU NON KONSTRUKSI NO: 001/IPSJIP/VI/2015.</p> <p>58.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Manajemen PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor: 110/JIP/PM/IV/2016 tanggal 15 april 2016.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disita dari **DEFIANA TARIGAN, S.T. tanggal 19 Oktober 2023**

7.	<p>1. 1 (satu) odner hitam yang berisikan dokumen fotocopy:</p> <p>a. Dokumen File Tower Catelya Bassura dengan isi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 6 (enam) lembar Dokumen Owner Estimate. 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal. 3) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Penawaran Harga. 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi. 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang. <p>b. Dokumen File Tower Astelia Bassura dengan isi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate. 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal. 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga. 4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi. 5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang. <p>c. Dokumen File Ratu Prabu 2 dengan isi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate. 2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal. 3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.</p> <p>5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.</p> <p>d. Dokumen File Menara Kuningan dengan isi:</p> <p>1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.</p> <p>2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.</p> <p>3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.</p> <p>4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.</p> <p>5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.</p> <p>e. Dokumen File Menara Graha Surveyor dengan isi:</p> <p>1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.</p> <p>2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.</p> <p>3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.</p> <p>4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.</p> <p>5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.</p> <p>f. Dokumen File Menara Gedung Maspion dengan isi:</p> <p>1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.</p> <p>2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.</p> <p>3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.</p> <p>4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.</p> <p>5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.</p> <p>g. Dokumen File Pondok Indah Tower 3 dengan isi:</p> <p>1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.</p> <p>2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.</p> <p>3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.</p> <p>4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.</p> <p>5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.</p> <p>h. Dokumen File Pondok Indah Tower 2 dengan isi:</p> <p>1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.</p> <p>2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.</p> <p>3) 16 (enam belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.</p> <p>4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.</p> <p>5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.</p> <p>i. Dokumen File Pondok Indah Tower 1 dengan isi:</p> <p>1) 7 (tujuh) lembar Dokumen Owner Estimate.</p> <p>2) 2 (dua) lembar Dokumen Request For Proposal.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 129 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>3) 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Penawaran Harga.</p> <p>4) 1 (satu) lembar Dokumen BA Klarifikasi & Klarifikasi.</p> <p>5) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Pemenang.</p>
<p>Disita dari ACHMAD HIDAYAT, S.E tanggal 02 Nopember 2023</p>	
8	<p>1. 1 (satu) lembar fotocopy Email dari Adi Fitra kepada Achmad Hidayat yang berisikan Paparan BPKAD – Pendanaan PMP dan Pinjaman Daerah untuk RKAP 2016, Pada tanggal 22 Oktober 2015.</p> <p>2. 1 (satu) lembar fotocopy Email dari Sultan Ery kepada Achmad Hidayat yang berisikan Revisi Buku Study Kelayakan, Pada tanggal 12 Desember 2015.</p> <p>3. 1 (satu) lembar fotocopy Kronologis Penyertaan Modal Daerah Tahun 2015 sampai 2016.</p> <p>4. 1 (satu) bundel fotocopy Pendanaan PMP dan Pinjaman Daerah Untuk RKAP 2016 PT. Jakarta ProPERTindo, Pada tanggal 22 Oktober 2015.</p>
<p>Disita dari DEFIANA TARIGAN, S.T. tanggal 07 Nopember 2023</p>	
9.	<p>1. 1 (satu) lembar SPK Implementasi CME area Maluku no : 001/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016.</p> <p>2. 1(satu) lembar SPK Implementasi CME area Papua Barat no : 002/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016.</p> <p>3. 1(satu) lembar SPK Implementasi CME area Nusa Tenggara Timur no : 003/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016.</p> <p>4. 1(satu) lembar SPK Implementasi CME area Sulawesi Utara no : 004/SPKDMT/V/2016 beserta 3(tiga) lembar lampiran tanggal 30 Mei 2016.</p>
<p>Disita dari RAMADHIANSYAH RAMBE tanggal 30 Nopember 2023</p>	
10.	<p>1. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Jakarta Properindo tanggal 4 Juni 2008 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.</p> <p>2. 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. JAKPRO tahun 2014.</p> <p>3. 1 (satu) Bundel rencana kerja dan anggaran kerja</p>

Halaman 130 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. 1 (satu) Bundel rencana kerja dan anggaran kerja perusahaan (RKAP)- revisi tahun 2015 PT.Jakpro.
- 5. 1 (satu) Bundel berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT.Jakpro dengan Nomor Akta 28 Tanggal 20 Januari 2015 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H.,M.Kn.
- 6. 1 (satu) Bundel berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT.Jakpro dengan Nomor Akta 3 Tanggal 4 Februari 2015 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H.,M.Kn.
- 7. 1 (satu) Bundel berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT.Jakpro dengan Nomor Akta 18 Tanggal 23 Juni 2015 dengan Notaris ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.
- 8. 1 (satu) Bundel pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar PT.Jakpro dengan Nomor Akta 91 Tanggal 14 Juli 2015 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H.,M.Kn.
- 9. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT.Jakpro tahun 2016.

Disita dari AJI RISQI YODHANA, S.H., M.H. tanggal 6 Desember 2023

- 11**
- 1. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Jakarta Komunikasi, Nomor Akta 131, pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan Notaris SUTJPTO, S.H., M.Kn.
 - 2. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-87605.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 19 November 2008 tentang Peretujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 3. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Jakarta Komunikasi berubah nama menjadi PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo, Nomor Akta 11, pada tanggal 4 Juni 2014 dengan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

Halaman 131 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Mitra Multi Solusi (M2S) dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor: 0035/M2S-JIP-00/SACME/04/XI/2015 tanggal 26 November 2015.
5. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac antara PT. M2S dengan PT. JIP yang berisikan:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-086, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 289 Nilai Rp. 415.000.000.
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-087, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 692 Nilai Rp. 415.000.000.
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-088, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 810 Nilai Rp. 415.000.000.
 - d. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-089, Tanggal 25 Februari 2016 Site Cirebon 533 Nilai Rp. 415.000.000.
 - e. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Sitac Nomor: 012/BAST_M2S/II/2016-090, Tanggal 25 Februari 2016 Site Makassar 508 Nilai Rp. 415.000.000.
6. 1 (satu) bundle fotocopy Purchase Order (PO) antara PT. M2S dengan PT. JIP yang berisikan:
 - a. Purchase Order Nomor: 05-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Selam Old Biaya Rp. 300.000.000.
 - b. Purchase Order Nomor: 03-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Boksit/Suasa Biaya Rp. 300.000.000.
 - c. Purchase Order Nomor: 01-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Kenanga Sari/Dr. Mansyur Biaya Rp. 300.000.000.
 - d. Purchase Order Nomor: 04-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Busi/Avros Biaya Rp.

Halaman 132 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Purchase Order Nomor: 02-1215/PO-M2S/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Site Karya Kasih Biaya Rp. 300.000.000.
7. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pekerjaan Site Accousition Site Acquisition & Civil Mechanical & Electrical antara PT. Triview Geospatial Mandiri (TGM) dan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Nomor: 0001/PPJ-SACME/TGM-XYZ/XX-2015, tanggal 14 Agustus 2015.
8. 1 (satu) bundle fotocopy Purchase Order (PO) antara PT. TGM dengan PT. JIP yang berisikan:
- a. Purchase Order Nomor: 0106 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Lampung, Rp.111.553.500.
- b. Purchase Order Nomor: 0107 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Purwokerto Kulon, Rp.163.098.130.
- c. Purchase Order Nomor: 0108 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Bontang, Rp.18.110.665.
- d. Purchase Order Nomor: 0109 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Slawi Wetan, Rp.206.584.000.
- e. Purchase Order Nomor: 0106 TGM 00002-0201-JAK-0815, tanggal 5 Desember 2015, Site Patean wetan, Rp.217.722.145.
9. 1 (satu) bundle fotocopy kelengkapan dokumen mendirikan tower dengan Site Yogyakarta Kentungan tinggi tower 42 Meter, tipe site Green Field/Roof Top.
- 10.1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Telkominfra Solusi Mandiri (TSM) nomor: 007/JIP/PKS/IX/2018 tanggal 13 september 2018.
- 11.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Towerindo

Halaman 133 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Inti (TPI).

12.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Intan Prima Sejahtera (IPS).

13.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Intan Pratama Sejahtera (IPS).

Disita dari AJI RISQI YODHANA, S.H., M.H. tanggal 6 Desember 2023

- 12.**
1. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PPKP Menara Sudirman dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor Ref. No. UM-203/HRL-LO/PPKP MS/VII/17.
 2. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perhimpunan Penghuni Menara Kadin Indonesia dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo nomor Ref/MGT/179.350.02(009)/MKI/V/2018, tanggal 28 Mei 2018.
 3. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Menara Duta dengan PT. Jakarta Infrastruktur Properindo nomor: 001-18/MD/MDB/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
 4. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Menara Antam Sejahtera dengan PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo No:012/MAS-SPK/VII/2018 tgl 25 Juli 2018.
 5. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Uji Terima antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Ardena Cakra Buana (ACB) tanggal 4 Januari 2018.
 6. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dengan PT. Ardena Cakra Buana (ACB) tanggal 4 Bulan Agustus 2017.
 7. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor: 014/JIP/SPH-BC/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, perihal Permohonan Penawaran Harga Kerjasama Penyambungan Serat Optik ke Gedung (Fiber to The Building/ FTTB).
 8. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor: 018/JIP/SPH-BC/V/2017 tanggal 12 Juni

Halaman 134 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2017, perihal Permohonan Penawaran Harga Kerjasama Penyambungan Serat Optik ke Gedung (Fiber to The Building/ FTTB).</p> <p>9. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari Jakarta Infrastruktur Propertindo Nomor: 004/JIP/SPH-BC/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, perihal Permohonan Penawaran Harga Kerjasama Penyambungan Serat Optik ke Gedung (Fiber to The Building/ FTTB).</p> <p>10.1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Material On Site, PT. Ardena Cakra Buana (ACB) Nomor SPK: 021/JIP/SPK/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur GPON.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Lim Lay Ming

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami Karel Tuppu, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Berlin Damanik, S.H.M.Hum., Nelson Pasaribu, S.H.M.H., Hakim Tinggi dan Margareta Yulie Bartin, S., S.H.M.M., Dr. Fauzan, S.H.M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI, ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu Sakir Baco, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Halaman 135 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berlin Damanik, S.H.M.H.,

Karel Tuppu, S.H.M.H.,

2. Nelson Pasaribu, S.H.M.H.,

3. Margareta Yulie Bartin, S., S.H.M.M.,

4. Dr. Fauzan, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI:

Sakir Baco, S.H.M.H.,

Halaman 136 putusan nomor 54/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)